



MAHKAMAH PELAYARAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
MAHKAMAH PELAYARAN**

MAHKAMAH
PELAYARAN

SELAMAT DATANG DI
MAHKAMAH PELAYARAN 10:00-05

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MAHKAMAH PELAYARAN

JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mahkamah Pelayaran sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan unit kerja yang wajib menjalankan Amanat yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga unit kerja Mahkamah Pelayaran bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Government*, dan sekaligus sebagai bentuk penilaian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Pelayaran dalam rangka memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan, Mahkamah Pelayaran terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang baik yang bersifat administratif maupun teknis melalui upaya-upaya seperti yang tertuang dalam visi dan misi Mahkamah Pelayaran.

Dalam dokumen Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran ini disajikan gambaran secara transparan mengenai pencapaian kinerja Mahkamah Pelayaran dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, dikaitkan dengan upaya-upaya strategis operasional yang telah dilakukan, serta disampaikan terkait hambatan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan .

Sangat disadari bahwa dalam iaporan Kinerja Mahkamah Pelayaran, masih banyak kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan bagi para

pemangku kepentingan dan umpan balik bagi seluruh jajaran Mahkamah Pelayaran guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta tercapainya pelayanan guna tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan di masa yang akan datang .

Akhir kata, saya selaku Ketua Mahkamah Pelayaran menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020.

Jakarta, Januari 2021

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN



ADI KARSYAF, S.H., M.H

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19610103 199103 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

Mahkamah Pelayaran sebagai salah satu unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan unit kerja yang wajib menjalankan Amanat yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara berjenjang, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan, dimana unit kerja Mahkamah Pelayaran bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Perhubungan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Mahkamah Pelayaran dalam menjalankan tugasnya melaksanakan fungsi :

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, evaluasi kegiatan, serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi;
- 2) Penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan;
- 3) Penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, pengelolaan tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi Birokrasi;
- 4) Pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan;
- 5) Penelitian sebab kecelakaan kapal dan penentuan ada atau tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- 6) Penjatuhan sanksi administratif kepada Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan;

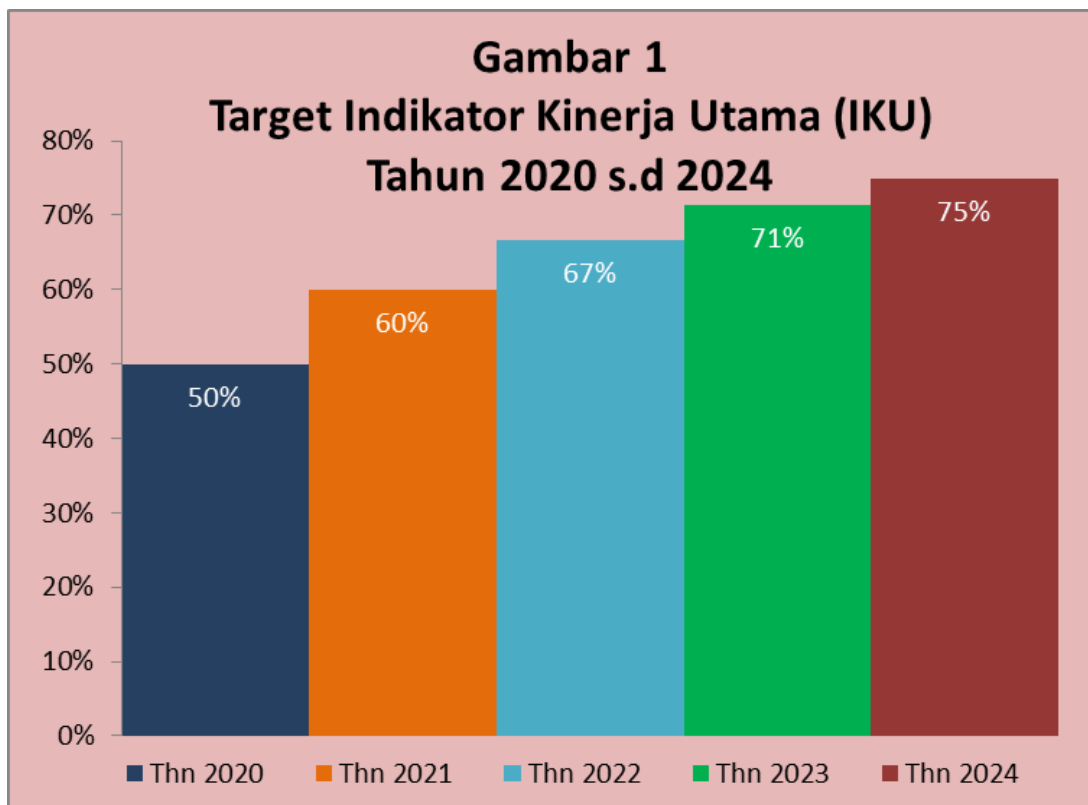
Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dimaksud melalui 5 (lima) sasaran yang meliputi :

- (1) Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Tahun 2020 s.d 2024
- (2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 berdasarkan IKU
- (3) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 berdasarkan SMART
- (4) Realisasi Anggaran

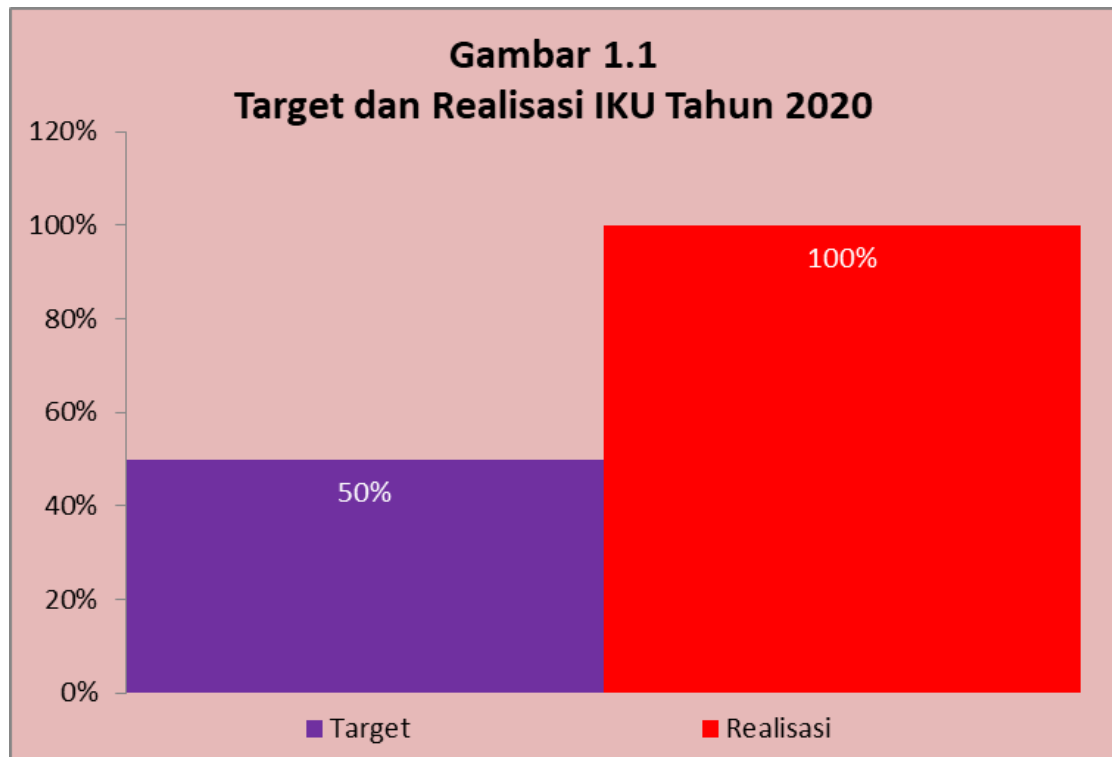
Berdasarkan tahapan pengukuran dihasilkan Nilai capaian kinerja sasaran program Mahkamah Pelayaran berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) mencapai 100% dari target 50% dan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan mencapai 94,12 % dari target 100% sedangkan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program tersebut adalah sebesar 98,61 dari alokasi anggaran.

Adapun Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Mahkamah Pelayaran antara lain :

a. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Tahun 2020 s.d Tahun 2024



- b. Target dan Realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah “Rekomendasi Hasil Keputusan Mahkamah Pelayaran yang ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut”



- c. Target dan Realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan adalah “Penyelesaian Perkara Kecelakaan Kapal yang di putus tepat waktu”



Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tentunya tidak terlepas dari dukungan seluruh personil sumber daya manusia yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran sebanyak 32 Pegawai, serta kesediaan anggaran sebesar Rp. 15.564.961.000, yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.707.830.000, Belanja Barang sebesar Rp. 11.554.365.000 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.302.766.000. Realisasi penyerapan anggaran sampai 2020 adalah sebesar Rp. 15.348.038.747 atau 98,61.% sisa dana tidak terserap sebesar Rp. 216.922.253 merupakan sisa kegiatan dari :

a. Belanja Pegawai

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2020 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp.86.815.542,-,

b. Belanja Barang

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2020 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp 130.106.711,-

c. Belanja Modal

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2020 Mahkamah Pelayaran sebesar Rp. 0,-

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 Bab I - 1
A. Latar Belakang.....	Bab I - 1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	Bab I - 2
C. Sumber Daya Manusia.....	Bab I – 5
D. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.....	Bab I – 10
E. Sistematika Penyajian	Bab I – 11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	 Bab II – 13
A. Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran	Bab II – 13
1. Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran	Bab II – 14
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	Bab II – 18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	Bab II – 21
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA MAHKAMAH PELAYARAN TAHUN 2020	
A. Capaian Kinerja	Bab III – 25
I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020....	Bab III – 27
II. Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	Bab III – 29
III. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Target Jangka Menengah (Renstra)	Bab III – 33
IV. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi.....	Bab III – 35

V. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	Bab III – 54
B. Realisasi Anggaran	Bab III – 60
 BAB IV P E N U T U P	 Bab IV – 66
A. Kesimpulan	Bab IV – 66
B. Saran/ Rekomendasi	Bab IV – 69

LAMPIRAN

Lampiran 1	Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019
Lampiran 2	Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020
Lampiran 3	Matriks Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
Lampiran 4	Dokumentasi Kegiatan

DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan	halaman
1.1.	Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran Menurut Status Kepegawaian (Struktural/Fungsional/Staf) dan Jenis Kelamin	BAB I – 6
1.2.	Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin	BAB I – 7
1.3	Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 8
1.4	Rekapitulasi Perekrutan di Mahkamah Pelayaran	BAB I – 8
1.5	Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran Menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis/Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan	BAB I – 9
2.1.	Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran	BAB II – 14
2.2	Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020	BAB II – 19
2.3.	Perjanjian Kinerja (PK) 2020	BAB II – 22
2.4.	Target dan Realisasi IKU tahun 2015-2019	BAB II – 24
2.5.	Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2020	BAB II – 24
3.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	BAB III – 27
3.2.	Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	BAB III – 29
3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target Jangka Menengah (Renstra)	BAB III – 33
3.4.	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2020 perbulan	BAB III – 55
3.5.	Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi	BAB III – 56
3.6.	Matriks Revisi Anggaran 2020	BAB III – 60
3.7.	Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2016 - 2020	BAB III – 60
3.8.	Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran	BAB III – 61
3.9.	Dana Belanja Pegawai Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap	BAB III – 63
3.10.	Dana Belanja Barang Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap	BAB III – 64
3.11.	Dana Belanja Modal Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap	BAB III – 65

DAFTAR DIAGRAM DAN BAGAN

nomor		halaman
1.1	Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran	BAB I – 4

DAFTAR GAMBAR

nomor	Keterangan	halaman
1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 -2024	Ringk.Eks - IV
1.1	Target dan realisasi IKK pertama	Ringk.Eks - V
1.2	Target dan realisasi IKK Kedua	Ringk.Eks - V
1.3.	SDM Mahkamah Pelayaran	BAB I – 5
1.4.	Komposisi Pegawai 4 Subbagian Mahkamah Pelayaran	BAB I – 5
3.1.	Capaian IKK Dalam Sasaran Pertama (%)	BAB III – 35
3.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 1)	BAB III – 36
3.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 2)	BAB III – 37
3.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 3)	BAB III – 38
3.1.4	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 4)	BAB III – 39
3.2.	Capaian IKK Dalam Sasaran Kedua (%)	BAB III – 40
3.3.	Capaian IKK Dalam Sasaran Ketiga (%)	BAB III – 41
3.3.1	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 6)	BAB III – 42
3.3.2	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 7)	BAB III – 43
3.4.	Capaian IKK Dalam Sasaran Keempat (%)	BAB III – 44
3.4.1	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 8)	BAB III – 45
3.4.2	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 9)	BAB III – 46
3.4.3	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 10)	BAB III – 47
3.4.4.	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 11)	BAB III – 48
3.5.	Capaian IKK Dalam Sasaran Kelima (%)	BAB III – 49
3.5.1	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 12)	BAB III – 50
3.5.2	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 13)	BAB III – 51
3.5.3	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 14)	BAB III – 52
3.5.4	Indikator Kinerja Kegiatan (Nomor 15)	BAB III – 53
4.1	Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2020	BAB IV - 64

DAFTAR GRAFIK

nomor	Keterangan	halaman
1.1.	Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran Menurut Status Kepegawaian (Struktural/Fungsional/Staf) dan Jenis Kelamin	BAB I – 6
1.2.	Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin	BAB I – 7
1.3	Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin	BAB I – 8
1.4	Rekapitulasi Perekrutan di Mahkamah Pelayaran	BAB I – 8
1.5	Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran Menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis/Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan	BAB I – 9



A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan maka disusunlah Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020. Laporan ini menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan Mahkamah Pelayaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2020.

Laporan Kinerja Mahkamah Pelayaran pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun 2020 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategis ini disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Mahkamah Pelayaran, yang pemenuhannya akan terakumulasi pada pencapaian tujuan strategis Mahkamah Pelayaran di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategis ini telah terpenuhi maka dapat dipersepsikan bahwa visi dan misi Mahkamah Pelayaran terpenuhi.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategis tertentu maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Capaian kinerja (*Performance Result*) tahun 2020 tersebut akan dibandingkan dengan Rencana kinerja (*Performance Plan*) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahunan 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Mahkamah Pelayaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara kelembagaan Mahkamah Pelayaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, telah diatur bahwa tugas pokok Mahkamah Pelayaran adalah melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Dalam peraturan tersebut sudah kurang relevan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, sehingga perlu disesuaikan.

Mahkamah Pelayaran adalah Unit dibawah Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Mahkamah Pelayaran dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan serta dibantu oleh Sekretariat Mahkamah Pelayaran. Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal.

Mahkamah Pelayaran bukan merupakan lembaga peradilan tetapi merupakan suatu lembaga kode etik profesi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Mahkamah Pelayaran mengemban peranan yang sangat penting dalam penciptaan keselamatan pelayaran serta dapat mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan keamanan pelayaran sesuai dengan Visi dan Misi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 76 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

Mahkamah Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, evaluasi kegiatan, serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi;
2. Penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan;
3. Penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, pengelolaan tata usaha, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi Birokrasi;
4. Pelaksanaan verifikasi berkas perkara pemeriksaan kecelakaan kapal, administrasi persidangan, pemberian dukungan substantif persidangan, pengetikan dan penggandaan konsep putusan;

5. Penelitian sebab kecelakaan kapal dan penentuan ada atau tidak adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
6. Penjatuhan sanksi administratif kepada Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan;

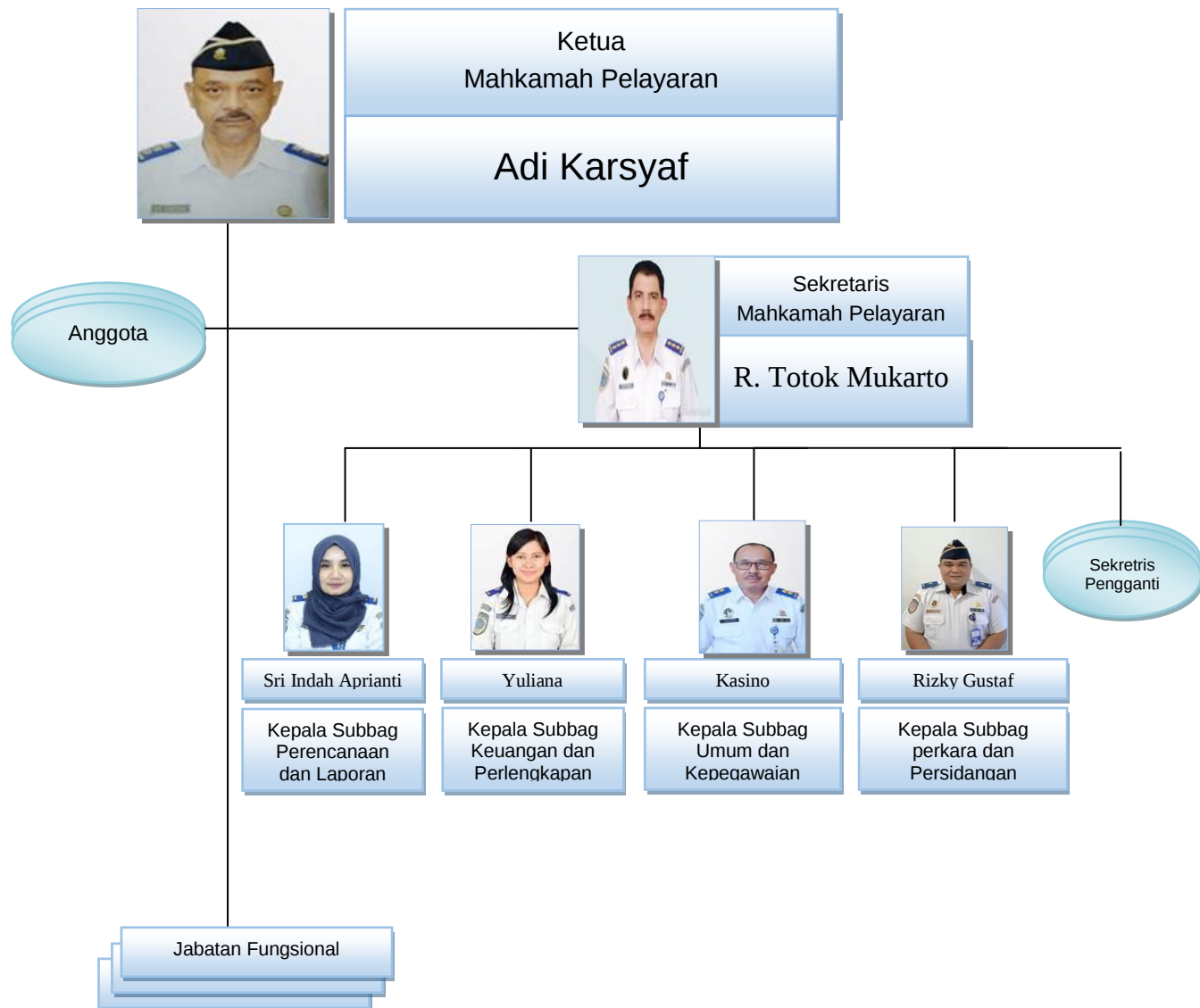
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi yang terdiri atas :

1. Ketua Mahkamah Pelayaran;
2. Sekretaris Mahkamah Pelayaran;
3. Subbagian Perkara dan Persidangan
4. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
5. Subbagian Perencanaan dan Laporan; dan
6. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 76 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH PELAYARAN

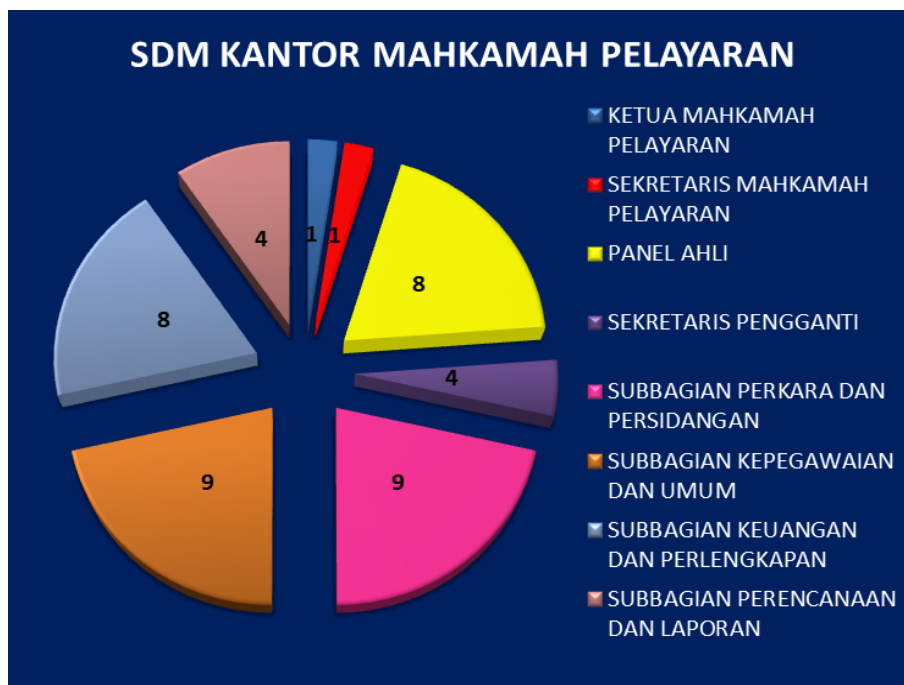
Diagram 1.1. Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran



C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Hingga saat ini Mahkamah Pelayaran memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 42 orang yang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 6 orang, Pegawai Fungsional Umum sebanyak 25 orang dan Fungsional tertentu 3 dan Non PNS 8 orang.

Gambar 1.3. SDM Kantor Mahkamah Pelayaran



Penempatan Pegawai dari jumlah tersebut relatif merata di masing-masing bidang dan bagian. Sebanyak 11 orang pegawai menempati Subbagian Perkara dan Persidangan, 9 orang pegawai menempati Subbagian Kepegawaian dan Umum, 8 orang menempati subagian Keuangan dan Perlengkapan dan 4 orang menempati Subbagian Perencanaan dan Laporan.

Gambar 1.4. Komposisi Pegawai 4 Subbagian di Mahkamah Pelayaran

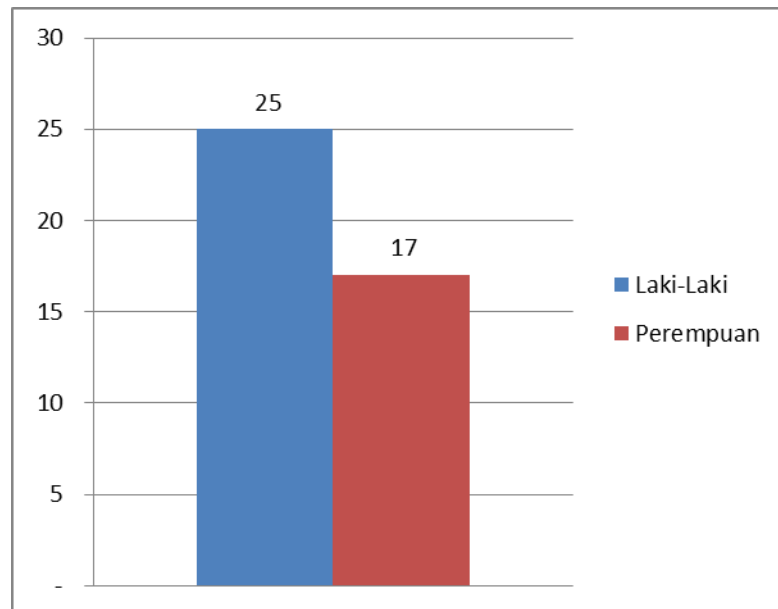


Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran
Menurut Status Kepegawaian (Struktural/Fungsional/Staf) dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
I	Struktural									
1.1	Eselon II	1	-	1	100	-	100	25	-	17
1.2	Eselon III	1	-	1	100	-	100	25	-	17
1.3	Eselon IV	2	2	4	50	50	100	50	100	67
	Sub Total	4	2	6	67	33	100	100	100	100
II	Fungsional Tertentu									
2.1	Analisis Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Arsiparis	1	-	1	100	-	100	11	-	9
2.3	Sekretaris Pengganti	-	2	2	-	100	100	-	100	18
2.4	Anggota Mahpel	8	-	8	-	-	-	89	-	73
	SubTotal	9	2	11	82	18	100	100	100	100
III	Fungsional Umum	12	13	25	48	52	100	100	100	100
	JUMLAH	25	17	42	60	40	100	100	100	100

Note : Jumlah PNS 34 orang dan Jumlah Non PNS Anggota Mahpel 8 orang

Grafik 1.1. Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran
Menurut Status Kepegawaian (Struktural/Fungsional/Staf) dan Jenis Kelamin

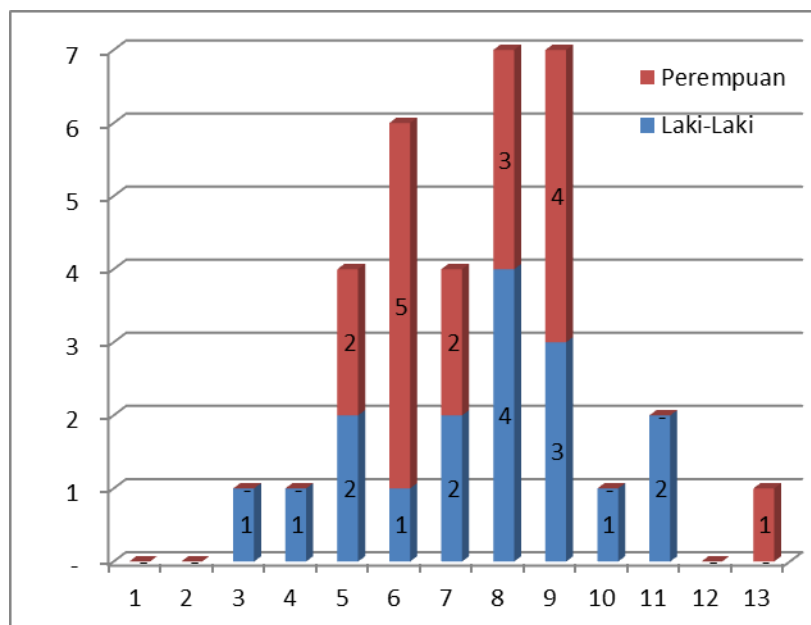


Tabel 1.2. Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran
Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Golongan IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Golongan IV/c	1	-	1	100	-	100	6	-	3
4	Golongan IV/b	1	-	1	100	-	100	6	-	3
5	Golongan IV/a	2	2	4	50	50	100	12	12	12
6	Golongan III/d	1	5	6	17	83	100	6	29	18
7	Golongan III/c	2	2	4	50	50	100	12	12	12
8	Golongan III/b	4	3	7	57	43	100	24	18	21
9	Golongan III/a	3	4	7	43	57	100	18	24	21
10	Golongan II/d	1	-	1	100	-	100	6	-	3
11	Golongan II/c	2	-	2	100	-	100	12	-	6
12	Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Golongan II/a	-	1	1	-	100	100	-	6	3
JUMLAH		17	17	34	50	50	100	100	100	100

Note : Jumlah PNS 34 orang dan Jumlah Non PNS Anggota Mahpel 8 orang

Grafik 1.2. Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran
Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin

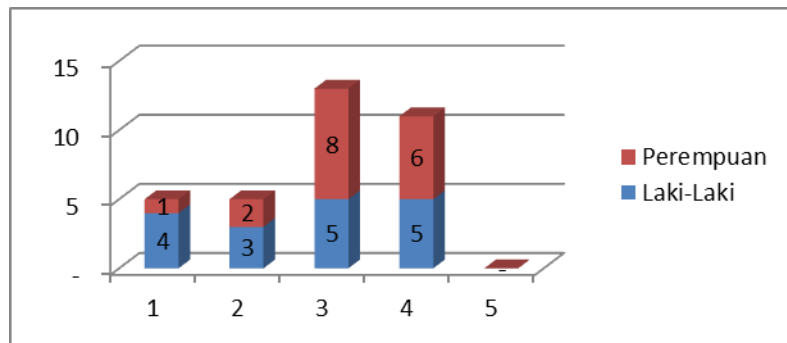


Tabel 1.3. Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	SLTA atau kurang	4	1	5	80	20	100	24	6	15
2	D.1-D.3	3	2	5	60	40	100	18	12	15
3	D.4/S.1	5	8	13	38	62	100	29	47	38
4	S.2	5	6	11	45	55	100	29	35	32
5	S.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		17	17	34	50	50	100	100	100	100

Note : Jumlah PNS 34 orang dan Jumlah Non PNS Anggota Mahpel 8 orang

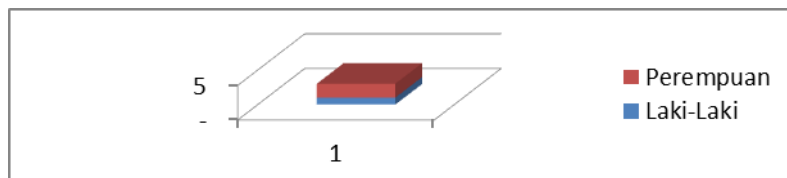
Grafik 1.3. Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran
Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin



Tabel 1.4. Rekapitulasi Perekrutan di Mahkamah Pelayaran

No	Tahun Perekrutan	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Tahun 2020	1	2	3	33	67	100	-	100	100
JUMLAH		1	2	3	33	67	100	-	100	100

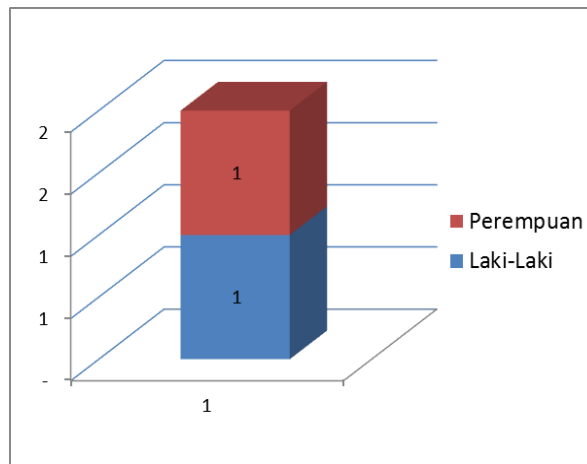
Grafik 1.4. Rekapitulasi Perekrutan di Mahkamah Pelayaran



Tabel 1.5. Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran
Menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis/Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Jumlah Pegawai			Presentase Komposisi Pegawai			Presentase Partisipasi Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Pendidikan/Pelatihan Administrasi									
1,1	Diklat Bendahara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,2	Diklat Administrasi Pengadaan BarJas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,3	Diklat Arsiparis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan									
2,1	Diklat Penjenjangan P PIM	1	1	2	50	50	100	-	50	67
2,2	Diklat Penjenjangan Q PIM III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,3	Diklat Penjenjangan R, dst PIM II, PIM I, LEMHANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		1	1	2	50	50	100	-	50	67

Grafik 1.5. Jumlah dan Persentase SDM Mahkamah Pelayaran
Menurut Keikutsertaan dalam Pelatihan Teknis/Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan



D. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Kebijakan Kemenhub yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel memiliki peran sangat penting untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan keberhasilan pembangunan perhubungan.

Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan selama tahun 2020-2024. Meningkatnya peran KNKT dan Mahkamah Pelayaran dalam menurunkan tingkat kecelakaan transportasi. Kebijakan Kementerian Perhubungan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran yaitu melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait dengan penerimaan berkas berita acara pemeriksaan pendahuluan dan tindak lanjut hasil keputusan Mahkamah Pelayaran. Upaya yang dilakukan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Mahkamah Pelayaran selama tahun 2020-2024, ditempuh kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target waktu yang ditempuh melalui strategi peningkatan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait tindak lanjut hasil keputusan sidang.
2. Melaksanakan investigasi dan pemeriksaan lanjutan kecelakaan transportasi secara cepat, tepat dan seadil-adilnya sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan, yang ditempuh melalui strategi, antara lain:
 - (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelidikan investigator kecelakaan transportasi.
 - (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung investigasi kecelakaan transportasi sesuai standard yang berlaku.
 - (3) Menyediakan sarana dan prasarana perantara perkantoran yang mendukung dan menjamin kebersihan di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
3. Menyediakan sarana dan prasarana perantara perkantoran yang mendukung dan menjamin kebersihan di lingkungan kantor pusat Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:

- (1) Peningkatan perencanaan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Sekretariat Mahkamah Pelayaran;
- (2) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana serta kebersihan di lingkungan kantor Sekretariat Mahkamah Pelayaran;
- (3) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran di lingkungan Mahkamah Pelayaran.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary).
3. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Tugas dan Fungsi Mahkamah Pelayaran, Struktur Organisasi Mahkamah Pelayaran dengan penekanan kepada arah Kebijakan dan strategis Mahkamah Pelayaran serta Sistematika Penyajian Laporan Kinerja tahun yang bersangkutan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini memuat rencana strategis Mahkamah Pelayaran yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Utama per sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran serta ringkasan Perencanaan Kinerja dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan.

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- A. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020;
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya;
 - 3) Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran Tahun 2015 – 2019;
 - 4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
 - 5) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

B. Realisasi Anggaran

Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

6. Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 serta saran tindak lanjut / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

7. Lampiran-Lampiran

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019;
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020;
- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2020;
- e. Lampiran lain yang dianggap perlu;
- f. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2020.



A. Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran

Rencana strategis menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana Strategis (RENSTRA) Mahkamah Pelayaran Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran. Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan dengan detail seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

1. Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran

Tabel 2.1. Visi, Misi dan Tujuan Mahkamah Pelayaran

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
Visi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam mewujudkan Visi Kementerian Perhubungan Yang Berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden	Terwujudnya Layanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal yang Cepat dan Tepat Waktu” dan “Tersedianya Data dan Informasi Putusan Kecelakaan Kapal

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
Misi	1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum Kementerian Perhubungan. 2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Transportasi. 3. Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan Yang Bersih Dan Akuntabel. 4. Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan. 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan. 6. Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi Dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan 7. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Budaya Kinerja. 8. Meningkatkan Kapabilitas Sistem Informasi Dan Teknologi Kementerian Perhubungan. 9. Meningkatkan Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi. 10. Meningkatkan Kapabilitas Kerjasama Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan	Menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal oleh Panel ahli yang profesional dalam bidangnya secara kualitatif sebagai pembinaan hukum dan penegakan hukum (<i>Law Enforcement</i>) perkapalan dan pelayaran serta tenaga profesi kepelautan agar angkutan laut di Indonesia dapat terselenggara dengan aman, selamat, lancar dan tertib

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
Tujuan	1. Meningkatnya efektivitas koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan dukungan administrasi kepada unsur organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan indikator indeks profesionalisme ASN, indeks merit system, indeks tata kelola manajemen ASN, indeks pengelolaan keuangan, indeks perencanaan, indeks pengawasan kearsipan, indeks pengelolaan aset. 2. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi birokrasi, dan penguatan bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia secara konsisten di lingkungan Sekretariat Jenderal dengan indikator indeks reformasi hukum, indeks kualitas kebijakan, indeks maturitas SPIP, indeks kelembagaan, indeks kepemimpinan perubahan. 3. Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi dengan indikator indeks SPBE Kementerian Perhubungan.	1) Terlaksananya tindak lanjut hasil keputusan Mahkamah Pelayaran oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 2) Penegakan Hukum di bidang keselamatan pelayaran dicapai dengan peningkatan akuntabilitas kinerja Mahkamah Pelayaran berupa berkas kecelakaan kapal yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Pelayaran yang tepat waktu.

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
	4. Mendorong stakeholder dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi investigasi kecelakaan transportasi dan hasil sidang Mahkamah Pelayaran dalam rangka kualitas manajemen keselamatan transportasi dengan indikator rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang ditindaklanjuti.	
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum diukur dengan indikator: Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan. 2. Meningkatnya kualitas transportasi yang berkelanjutan diukur dengan indikator: Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca sektor transportasi. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik diukur dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	1. Meningkatkan Peran Mahkamah Pelayaran dalam menurunkan tingkat kecelakaan kapal. 2. Meningkatnya kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan proses sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. 3. Meningkatnya efektivitas sosialisasi / desiminasi / seminar / workshop publikasi tentang keselamatan pelayaran. 4. Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal 5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi

Uraian	Sekretariat Jenderal	Mahkamah Pelayaran
Indikator	1. Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapat Class Action oleh Masyarakat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan. 2. Penurunan Emisi GRK sektor transportasi. 3. Indeks RB Kementerian Perhubungan.	1. Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan dan Sidang Mahkamah Pelayaran yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i> dan regulator; 2. Putusan Hukum dibidang Keselamatan Pelayaran

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 :

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Untuk mengukur kinerja Mahkamah Pelayaran, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan tahunan organisasi.

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana strategis bukanlah satu satunya dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun suatu rencana kinerja. Selain Renstra dokumen lain atau peraturan lain yang menjadi acuan adalah Undang - Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan / kegagalan

penyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen rencana kinerja antara lain berisikan informasi mengenai : sasaran, indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Kelima sasaran yang terdapat di dalam Dokumen Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran tahun 2015 – 2019 pelaksanaannya diwujudkan melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Mahkamah Pelayaran yang dijabarkan kedalam 5 (Lima) kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan proses sidang pemeriksaan lanjut kecelakaan kapal.
2. Meningkatnya efektifitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal .
3. Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal
4. Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi
5. Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran.

Target Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 secara umum sejalan dengan Target yang ada pada Rencana Strategis 2020 - 2024, secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.2. Tabel RKT 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1)	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	50
		2)	Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
		3)	Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
		4)	Persentase Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku	%	100
2.	Meningkatnya efektifitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	5)	Persentase Peserta Sosialisasi / diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi tentang keselamatan pelayaran	%	100
3.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	6)	Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal	Laporan	1
		7)	Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100
4.	Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi	8)	Rasio laporan pengawasan Implementasi pelayanan perintis dan Subsidi Angkutan Udara yang ditindaklanjuti	%	100
		9)	Jumlah laporan penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1
		10)	Jumlah keikutsertakan Mahkamah pelayaran Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional	Laporan	1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
		11)	Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran	Laporan	5
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	12)	Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100
		13)	Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100
		14)	Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100
		15)	Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 ini, merupakan bentuk tekad Mahkamah Pelayaran dalam mewujudkan "Good Governance" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2020.

Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran ini merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun service agreement dan dokumen "kontrak" antara pimpinan unit - unit kerja dengan Pimpinan Mahkamah Pelayaran serta kontrak kinerja Pimpinan Mahkamah Pelayaran dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja ini adalah rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Strategis Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 - 2024 yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Perjanjian Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target - target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta

untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu defenitif).

Maksud perjanjian kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renstra), maka ditetapkan target kinerja tahunan.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1)	Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	50
		2)	Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
		3)	Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal	%	100
		4)	Persentase Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku	%	100
2.	Meningkatnya efektifitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	5)	Persentase Peserta Sosialisasi / diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi tentang keselamatan pelayaran	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
3.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	6)	Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal	Laporan	1
		7)	Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100
4.	Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi	8)	Rasio laporan pengawasan Implementasi pelayanan perintis dan Subsidi Angkutan Udara yang ditindaklanjuti	%	100
		9)	Jumlah laporan penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1
		10)	Jumlah keikutsertakan Mahkamah Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional	Laporan	1
		11)	Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran	Laporan	5
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	12)	Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100
		13)	Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100
		14)	Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100
		15)	Persentase putusan yang diakses oleh public	%	100

Indikator merupakan suatu ukuran yang memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi, baik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Indikator juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi pada masa yang akan datang. Dalam Indikator Kinerja Utama Mahkamah Pelayaran Tahun 2015 – 2019,, sudah tidak relevan lagi, sehingga Indikator utamanya berubah. Adapun Indikator Kinerja Utama lama ini menjelaskan banyaknya jumlah perkara putusan sidang, sedangkan Indikator Kinerja Utama di tahun 2020 - 2024 menjadi Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi IKU tahun 2015 - 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja (Dalam Bentuk Jumlah Angka)														
		2015			2016			2017			2018			2019		
		Target	Rea lisasi	%	Target	Rea lisasi	%	Target	Rea lisasi	%	Target	Rea lisasi	%	Target	Rea lisasi	%
1.	Jumlah perkara kecelakaan kapal yang disidangkan dan diputus tepat waktu	50	34	75	30	33	110	30	28	93	30	34	113	33	19	57

Dalam rangka pencapaian target selama Tahun 2020, dialokasikan anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2020

Uraian Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	
1.	Putusan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran	Rp.	3.266.247.000
2.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Rp.	4.319.466.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp.	1.302.766.000
4.	Layanan Perkantoran	Rp.	6.676.482.000
TOTAL		Rp.	15.564.961.000



Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Untuk mengukur kinerja Mahkamah Pelayaran, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja

Persentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Persentase pencapaian sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan persentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun. Dalam penghitungan persentase capaian kinerja terdapat 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut :

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{(2 \times T \text{ arget}) - R \text{ eal isasi}}{T \text{ arget}} \times 100\%$$

Pencapaian Kinerja Mahkamah Pelayaran tahun 2020 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.

I. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2020

Tabel 02.11 Pelaksanaan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020										
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2020				Total	Capaian (%)
					Triw. 1	Triw. 2	Triw. 3	Triw. 4		
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	50				100	100	200
		2) Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100				94,12	94,12	94,12
		3) Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal	%	100				100	100	100
		4) Persentase Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku	%	100				100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran										494,12
2.	Meningkatnya efektifitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	5) Persentase Peserta Sosialisasi / diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi tentang keselamatan pelayaran	%	100				100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran										100
3.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	6) Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal	Laporan	1				1	1	100
		7) Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	11,76		47,06	41,18	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran										200

4.	Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi	8)	Persentase SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal	%	100				40	40	40
		9)	Jumlah laporan penataan system manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1				1	1	100
		10)	Jumlah keikutsertakan Mahkamah pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional	Laporan	1				1	0	0
		11)	Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran	Laporan	5				5	5	100
Rata-Rata Capaian Sasaran										240	
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	12)	Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	20,46	14,29	19,92	43,93	98,61	98,61
		13)	Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100				100	100	100
		14)	Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100				102,66	102,66	102,66
		15)	Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100				100	100	100
Rata-Rata Capaian Sasaran										401,27	

II. Perbandingan Target Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.2. Perbandingan target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1. Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	Indikator Kinerja Utama (IKU) lama Tahun 2016 – 2019												50	100	200
		2. Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	30	33	110	30	28	90	30	33	110	33	19	57,6	100	94,12	94,12
		3. Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		4. Persentase Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				101,30			99,13			101,30			93,99			112,60		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)
2.	Meningkatnya efektivitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	5) Persentase Peserta Sosialisasi / diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi tentang keselamatan pelayaran	%	55	120	218	55	120	218	55	50	91	60	205	341	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				218			218			91			341			100		
3.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	6) Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal	Laporan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
		7) Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	30	33	110	30	28	93,33	34	34	100	18	18	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				109,67			93,55			100			100			100		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Targe t PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)
4.	Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi	8) Persentase SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yg ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalitas pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal	%	15	15	100	15	15	100	15	15	100	17	17	100	100	40	40
		9) Jumlah laporan penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
		10) Jumlah keikutsertaan Mahkamah Pelayaran dalam Sidang IMO	Laporan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	0	0
		11) Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran	Laporan	1			1	1	100				1	1	1	5	5	100
Rata-rata Capaian Sasaran				94,44			100			100			100			42,66		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Targe t PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)	Target PK	Realisasi	(%)
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariaan Mahkamah Pelayaran	12) Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	81,48	81,48	100	91,82	91,82	100	92,88	92,88	100	97,34	97,34	100	98,61	98,61
		13) Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		14) Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100	100	100	100	100	100	100	88,87	88,87	100	95	95	100	102,66	102,66
		15) Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran				79,62			97,95			95,44			98,08			100,31		

III. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA)

Tabel. 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi Kinerja		
				Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	50	100	200
		2) Persentase penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	94,12	94,12
		3) Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal	%	100	100	100
		4) Persentase Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku	%	100	100	100
2.	Meningkatnya efektifitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	5) Persentase Peserta Sosialisasi / diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi tentang keselamatan pelayaran	%	100	100	100
3.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	6) Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal	Laporan	1	1	100
		7) Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Perbandingan Realisasi Kinerja		
				Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
4.	Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi	Persentase SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal	%	100	40	40
		9) Jumlah laporan penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1	1	100
		10) Jumlah keikutsertakan Mahkamah pelayaran Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional	Laporan	1	0	0
		11) Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran	Laporan	5	5	100
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	12) Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	98,61	98,61
		13) Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100	100	100
		14) Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100	102,66	102,66
		15) Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100	100	100

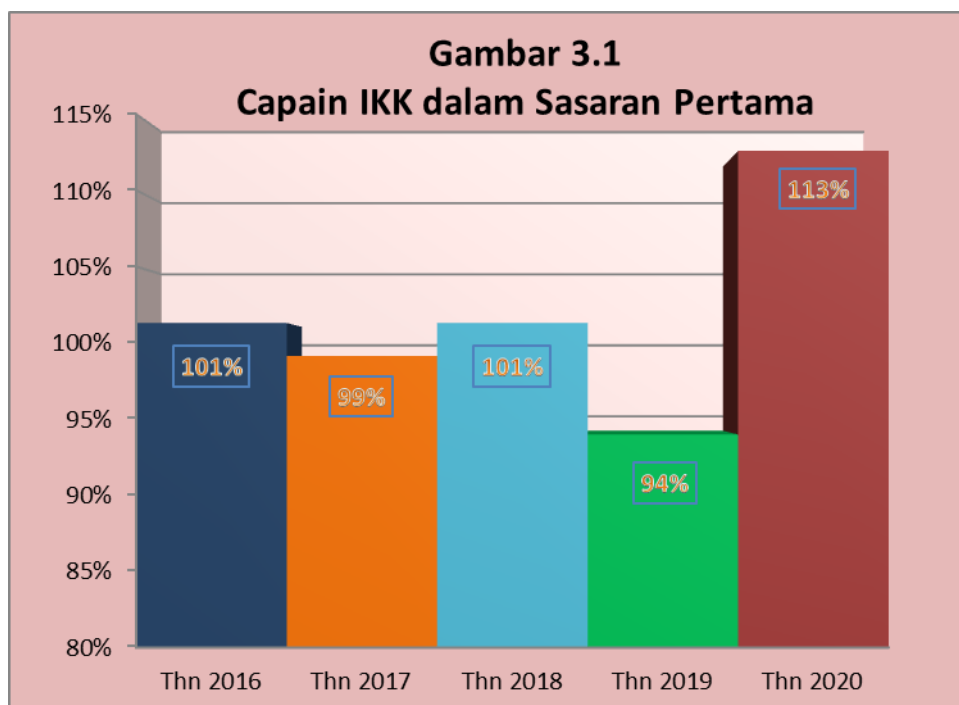
IV. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

a. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan pelayaran”

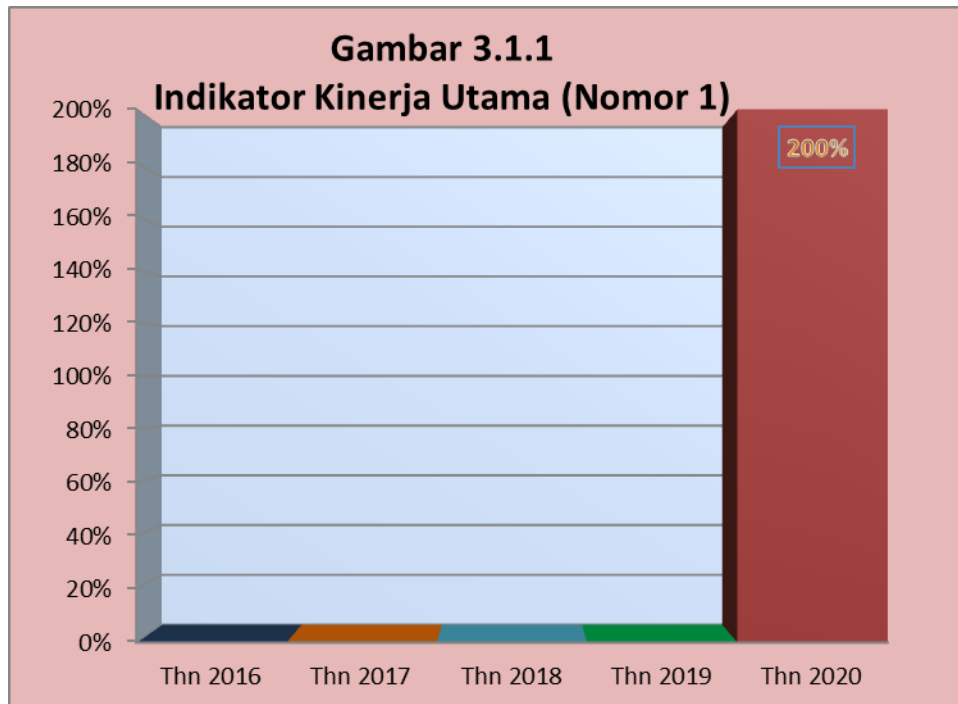
Sasaran ini dicapai melalui satu program yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran yaitu Penegakan Hukum di bidang Keselamatan Pelayaran.

Adapun kegiatan ini yang telah disetujui dalam DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun Anggaran 2020, guna mencapai sasaran yang pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran;
- 2) Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu;
- 3) Ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal;
- 4) Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku.



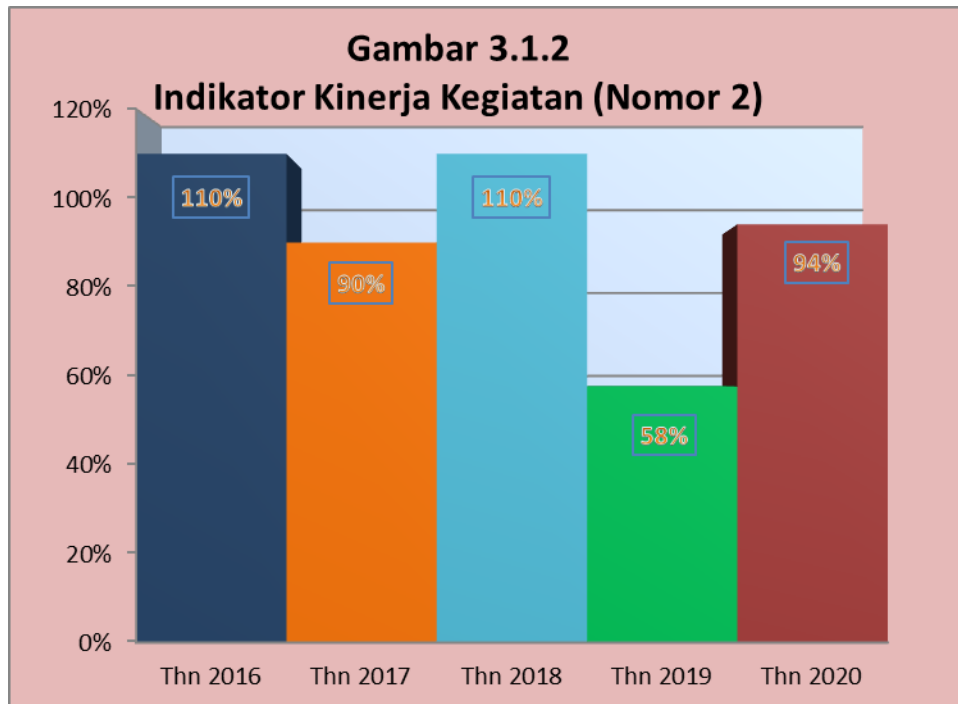
- (1) Pada Indikator Kinerja “Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 50%, dengan realisasi kinerja 100% dengan capaian kinerja adalah sebesar 200%.



Kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja utama ini, diambil dari Keputusan Mahkamah Pelayaran atas Penjatuhan sanksi administratif kepada nahkoda atau pemimpin kapal dan atau perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan, ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Target kinerja yang berhasil dicapai pada tahun 2020 adalah 50% dengan realisasi 100% dan tingkat capaian 200 %. Berdasarkan capaian indikator dimaksud dapat dinyatakan bahwa Mahkamah Pelayaran telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tahun 2020. Beberapa faktor yang mendukung capaian indikator ini adalah meningkatnya kerjasama dan koordinasi antara Mahkamah Pelayaran dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait dengan proses pemeriksaan kecelakaan kapal.

(2) Pada Indikator Kinerja “Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu” Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 94,12% dan capaian kinerja 94,12%.



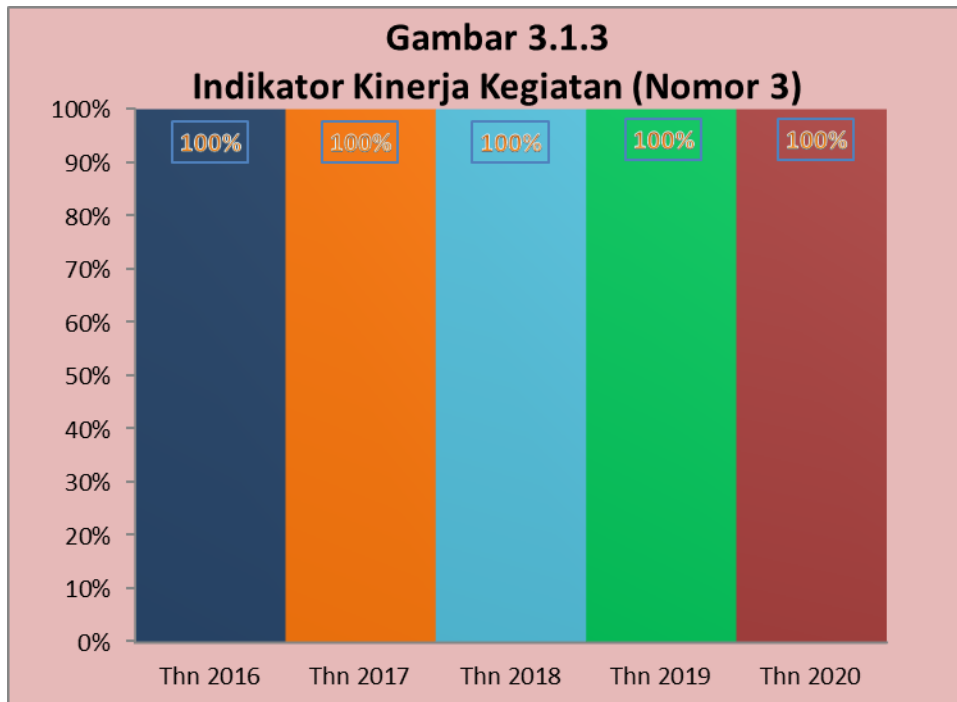
Pada Indikator Kinerja ini sebagai sasaran Sekretariat Jenderal untuk menunjukkan kinerja Mahkamah Pelayaran dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- Indikator kinerja jumlah putusan perkara kecelakaan kapal yang disidangkan dan diputus tepat waktu, indikator ini untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Pelayaran dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara kecelakaan kapal melalui proses sidang pemeriksaan lanjutan;
- Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang percepatan pemeriksaan kecelakaan kapal..

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut antara lain :

1. Adanya Corona Covid-19
2. Pemberhentian dan pengangkatan kembali Panel Ahli
3. Terjadinya kesalahan dalam Surat Keputusan Panel Ahli

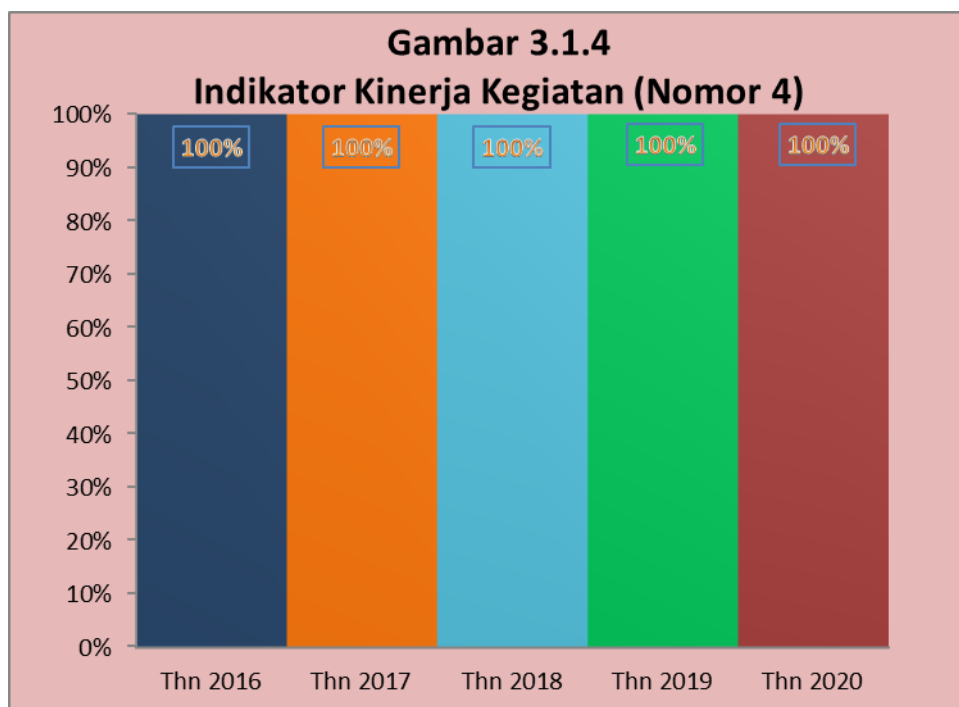
- (3) Pada Indikator Kinerja “Ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal” Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.



Pada Indikator Kinerja ini adalah untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dengan ukuran indikator sebagai berikut:

- ✚ Penelitian sebab-sebab kecelakaan kapal dan penentuan ada atau tidak adanya kesalahan dan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh nahkoda atau pemimpin kapal dan atau perwira kapal atas terjadinya kecelakaan kapal;
- ✚ Terselenggaranya persidangan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Pada Indikator Kinerja “Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

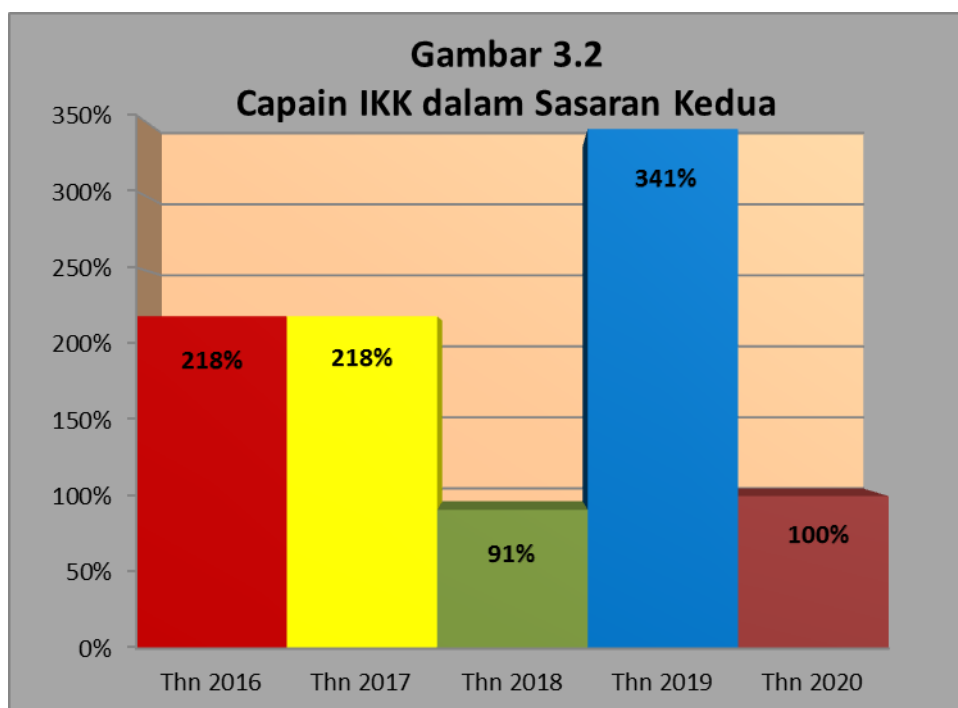


Pada Indikator Kinerja ini Mahkamah Pelayaran menerima pelimpahan berkas kecelakaan kapal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal yang dilakukan oleh Syahbandar yang terdiri dari :

- a) Laporan Kecelakaan Kapal
- b) Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Kecelakaan Kapal
- c) Kesimpulan (resume) hasil pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal
- d) Surat – surat/dokumen kapal dan pendukung lainnya.

Berdasarkan pelimpahan berkas perkara tersebut maka dilakukan rapat persiapan untuk dilakukan verifikasi dan penelitian data awal kecelakaan kapal.

- b. **Sasaran kedua adalah** “Meningkatnya efektifitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal”. Pada Indikator Kinerja (5) “Persentase Peserta Sosialisasi / diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi tentang keselamatan pelayaran”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.



Pada Indikator Kinerja ini diharapkan sinergitas dalam kegiatan sosialisasi/workshop/FGD/Bimtek :

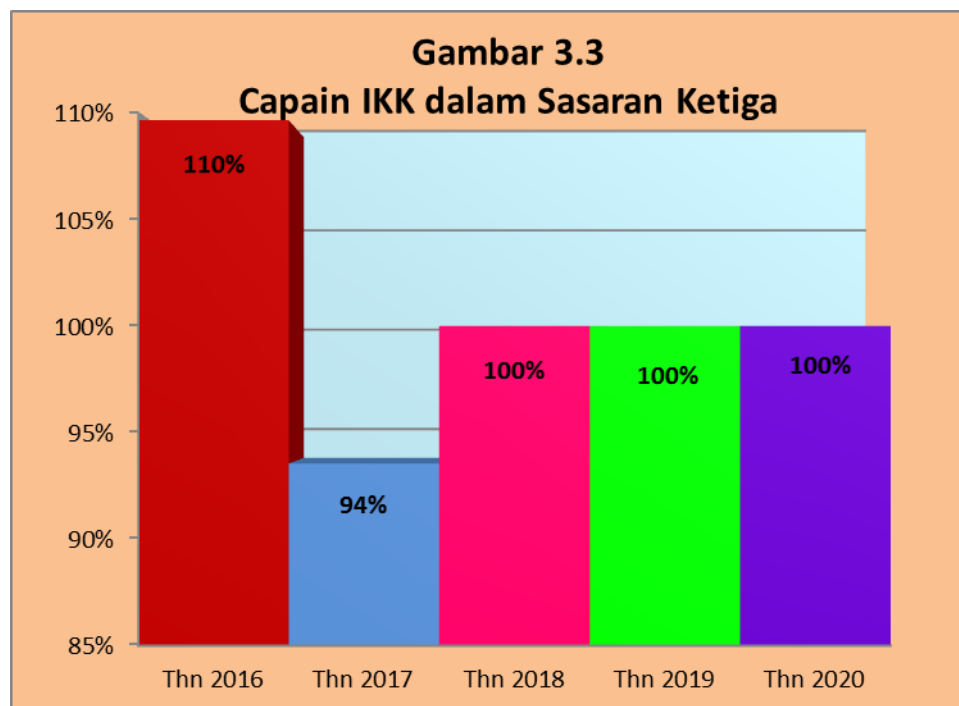
- ✚ Peran dan fungsi Mahkamah Pelayaran dalam penanganan permasalahan keamanan di laut.
- ✚ “Perlunya Peradilan Maritim (*Maritime Court*) sebagai upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum di bidang Kemaritiman di Indonesia.
- ✚ Perkuatan Mahkamah Pelayaran sebagai tindak lanjut pelaksanaan workshop tentang Perlunya Peradilan Maritim (*Maritime Court*) sebagai upaya penyelesaian perbuatan melawan hukum di bidang Kemaritiman di Indonesia

Pada tahun 2020 ada kegiatan bimtek dengan FGD dengan jumlah target peserta 40 orang dan yang mengikuti kegiatan tersebut ada 40 orang.

- c. **Sasaran ketiga adalah** “Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal”.

Adapun kegiatan ini yang telah disetujui dalam DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun Anggaran 2020, guna mencapai sasaran yang pertama adalah sebagai berikut :

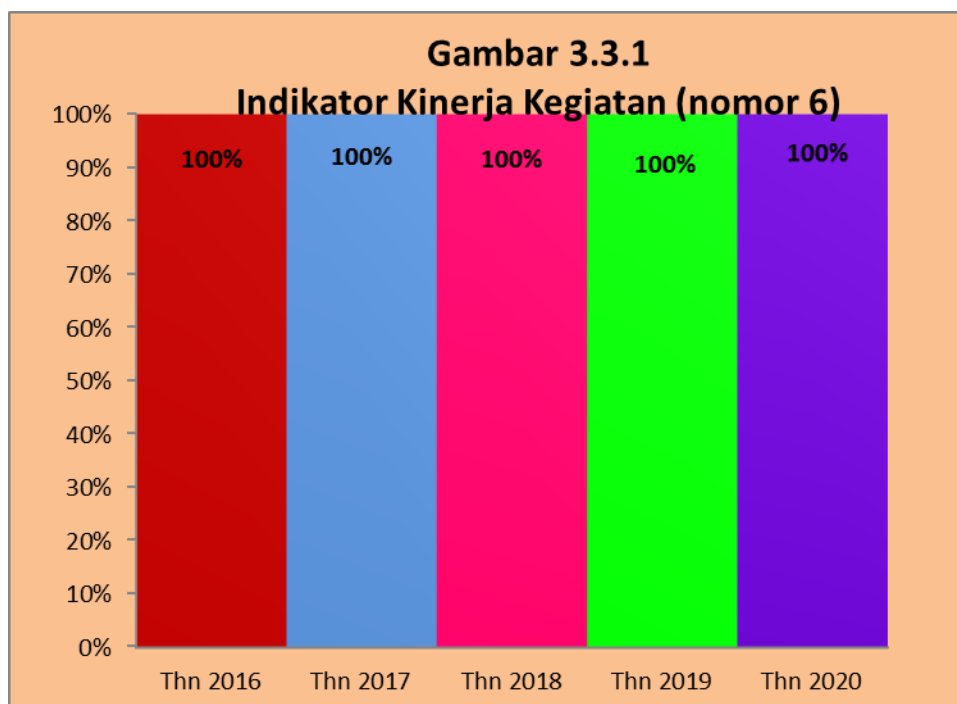
- 6) Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal;
- 7) Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran;



Sasaran ini dimaksudkan untuk memberikan layanan terhadap masyarakat yang memerlukan informasi terkait proses pemeriksaan kecelakaan kapal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Pelayaran dalam hal ini berupa penyelesaian perkara kecelakaan melalui Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

Melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegiatan sidang pemeriksaan kecelakaan kapal untuk disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran sebagai bentuk media informasi tentang proses penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran dengan prosentase realisasi 100%.

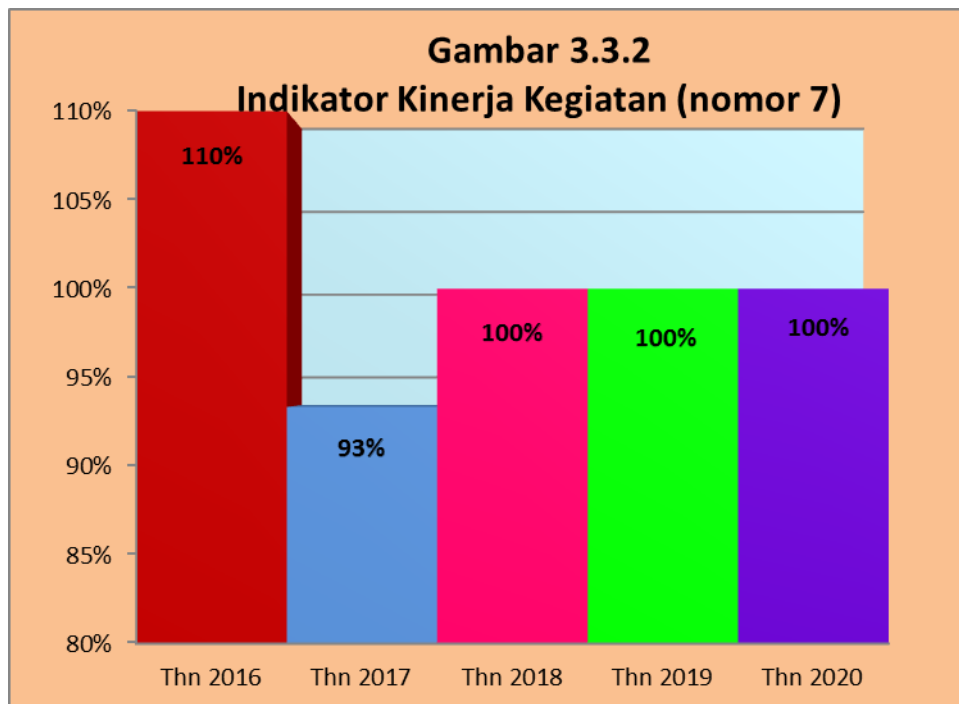
- (6) Pada Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 1 dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.



Salah satu komponen strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah program yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi dari program adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang ada merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi.

Melaksanakan penyusunan statistik kecelakaan kapal sebagai bentuk penyajian data kecelakaan kapal yang diproses oleh Mahkamah Pelayaran di tahun 2020. Sebagai indikatornya adalah jumlah laporan statistik kapal. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan penyusunan data statistik kecelakaan kapal berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Pelayaran. Kegiatan ini mempunyai target capaian 1 (satu) laporan.

- (7) Pada Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

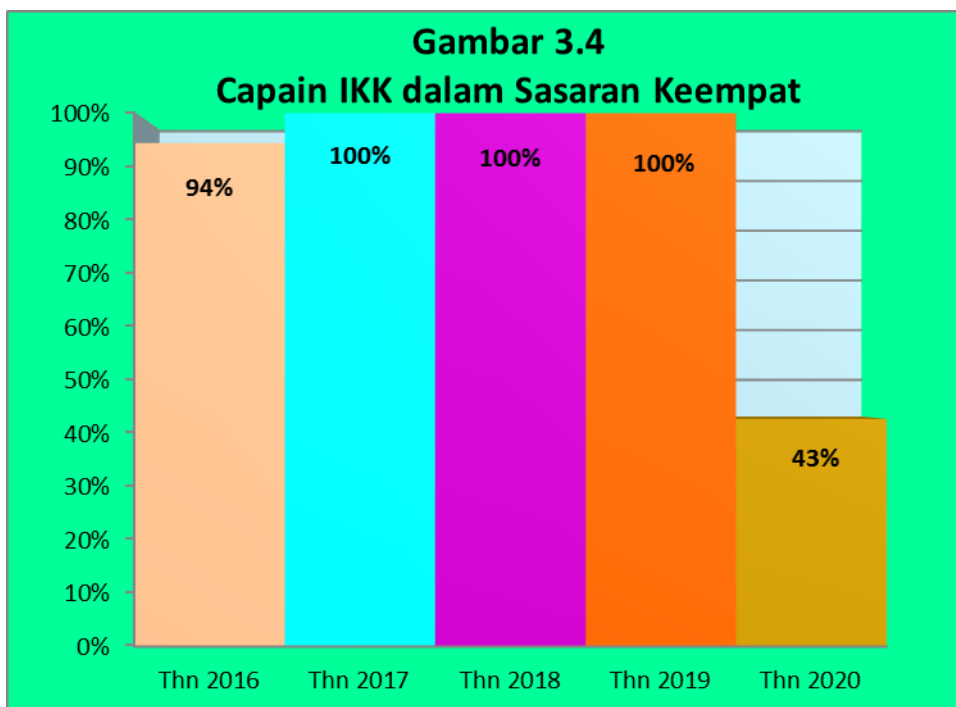


Melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegiatan sidang pemeriksaan kecelakaan kapal untuk disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran sebagai bentuk media informasi tentang proses penyelesaian kasus kecelakaan kapal oleh Mahkamah Pelayaran dengan prosentase realisasi 100%. Pada tahun 2020 ada 17 jumlah Keputusan Mahkamah Pelayaran dan disajikan melalui website sebanyak 17 Keputusan Mahkamah Pelayaran.

d. Sasaran keempat adalah “Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi”

Adapun kegiatan ini yang telah disetujui dalam DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun Anggaran 2020, guna mencapai sasaran yang pertama adalah sebagai berikut :

- 8) Persentase SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal;
- 9) Jumlah laporan penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran;
- 10) Jumlah keikutsertakan Mahkamah Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional;
- 11) Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran.

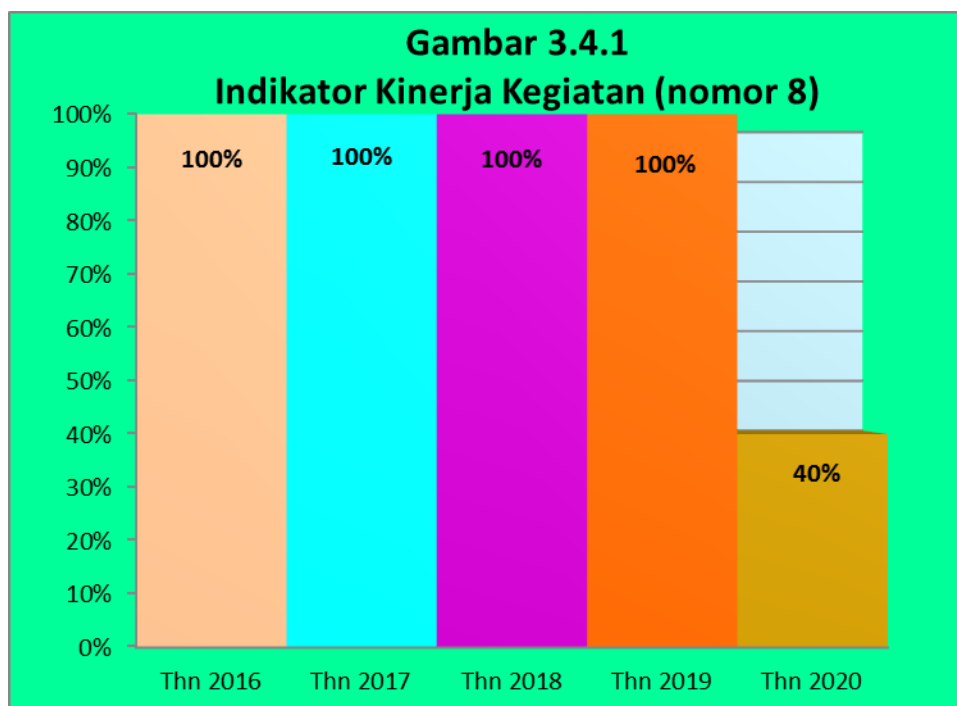


Sasaran ini dicapai melalui Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam mencapai tujuan organisasi. Ketersediaan dan kompetensi pegawai merupakan hal yang perlu dipenuhi agar proses kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.

Analisis tingkat kecukupan pegawai bertujuan untuk mengetahui tingkat produktifitas dan kinerja pegawai.

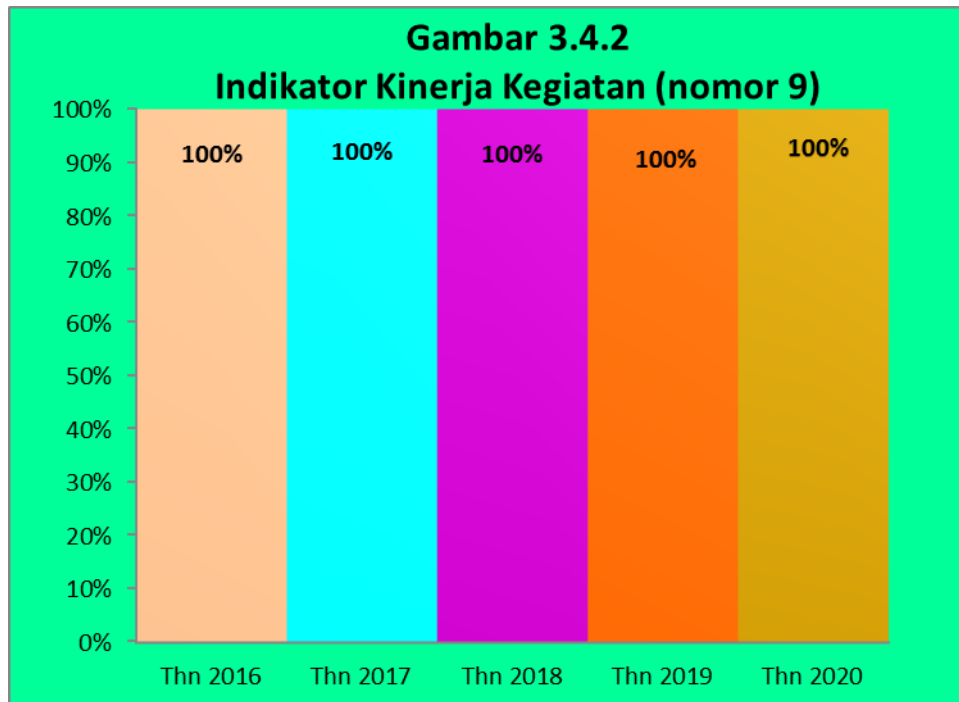
- (8) Pada Indikator Kinerja “Persentase SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 40% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 40%..



Melaksanakan proses untuk memenuhi formasi Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran dengan pengajuan formasi kebutuhan jabatan Hakim/Anggota Mahkamah Pelayaran sebagai upaya memenuhi kekurangan formasi hakim akibat mutasi/pensiun yang terjadi. Target yang di harapkan pada Tahun 2020 adalah 20 Anggota hakim, realisasinya tinggal 8 Anggota Hakim. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut antara lain :

1. Masih terprosesnya peraturan atau tata cara perekrutan anggota hakim yang belum selesai.
2. Adanya keraguan pelamar karena hak keuangannya yang masih belum selesai dibahas.
3. Banyaknya para hakim anggota yang masuk masa purnabakti.
4. Adanya Corona Covid-19.

- (9) Pada Indikator Kinerja “Jumlah laporan penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 1 dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.



Mahkamah Pelayaran sebagai unit organisasi dibawah Kementerian Perhubungan dalam pembinaan kepegawaian selalu berpedoman kepada peraturan - peraturan yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Perhubungan, adapun kegiatan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian di Mahkamah Pelayaran, yaitu :

a. Penyusunan Formasi Kepegawaian

Dalam kegiatan penyusunan formasi kepegawaian, adapun rincian tugas pengelola kepegawain, yaitu :

- Analisa Kebutuhan Pegawai
- Uraian Jabatan
- Peta Jabatan

b. Penyusunan Kenaikan Pangkat Pegawai

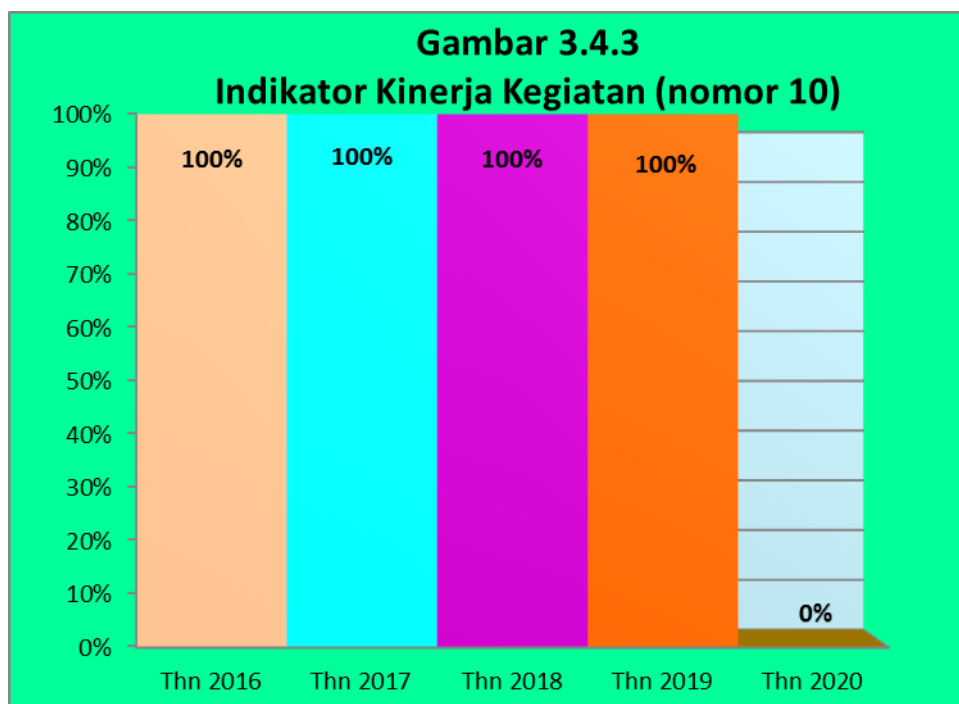
c. Pengelolaan Data Base Kepegawaian

d. Pemantapan Kepegawaian

e. Kegiatan Pindah/Pensiun Pegawai Negeri Sipil

f. Pembahasan Tunjangan Kinerja

- (10) Pada Indikator Kinerja “Jumlah keikutsertaan Mahkamah Pelayaran dalam sidang IMO”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 1 dengan realisasi 0 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 0.



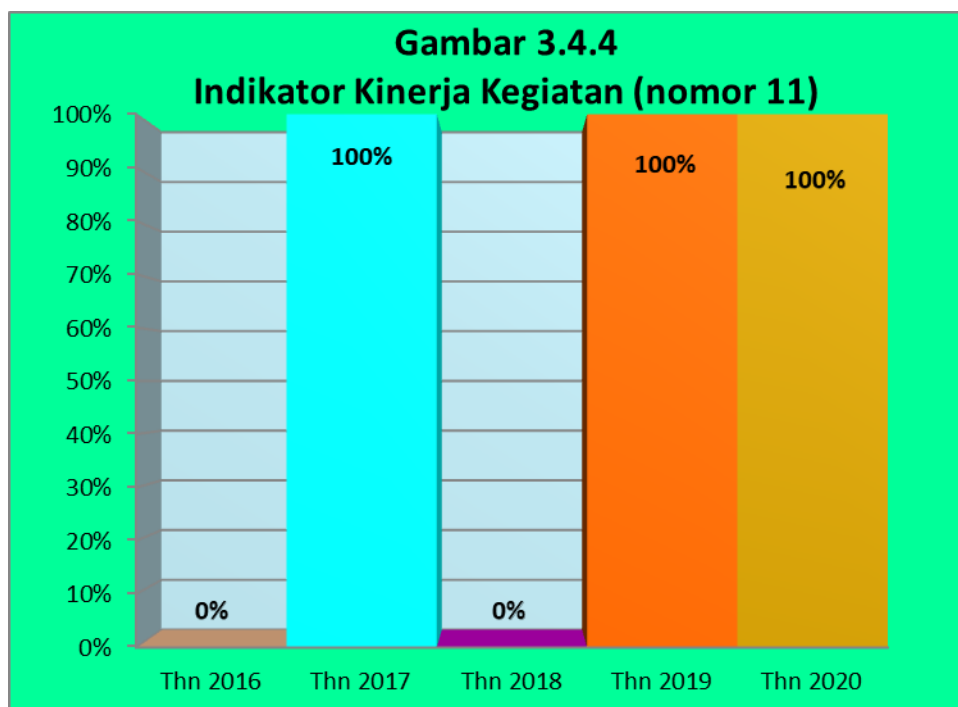
Guna mengendalikan risiko terhadap kecelakaan kapal maka Organisasi Maritim Dunia (IMO) mengeluarkan peraturan antara lain SOLAS 1974 Pasal 21 Part C dan UNCLOS 1982 Article 93 ayat (7), yang keduanya mencantumkan klausula agar “setiap negara melakukan pemeriksaan terhadap setiap kecelakaan yang terjadi agar dapat digunakan untuk perbaikan”. Peraturan tersebut berkenaan dengan aturan Keselamatan Pelayaran.

Sebagai konsekuensi dari hal - hal tersebut diatas maka Mahkamah Pelayaran Indonesia yang tugas pokoknya adalah penegakan hukum dibidang keselamatan pelayaran, dituntut mampu untuk menciptakan suatu tatanan keselamatan berlayar bagi pihak - pihak terkait yang melaksanakan aktifitas transportasi kelautan. Terwujudnya penyelenggaraan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal secara tepat, cepat, dan seadil - adiknya berdasarkan kaidah - kaidah hukum yang berlaku terhadap pihak - pihak berkaitan dengan keselamatan pelayaran.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tersebut antara lain :

- ✚ Adanya corona covid-19
- ✚ Adanya kekosongan yang cukup lama pada posisi pejabat struktural (Ketua Mahkamah Pelayaran dan Sekretaris Mahkamah Pelayaran)

(11) Pada Indikator Kinerja “Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 5 dengan realisasi 5 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%



Untuk meningkatkan kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas regulasi sebagai upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kelengkapan kerja lainnya. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atau Rancangan Peraturan Lainnya sebagai Indikator untuk mencapai sasaran ini.

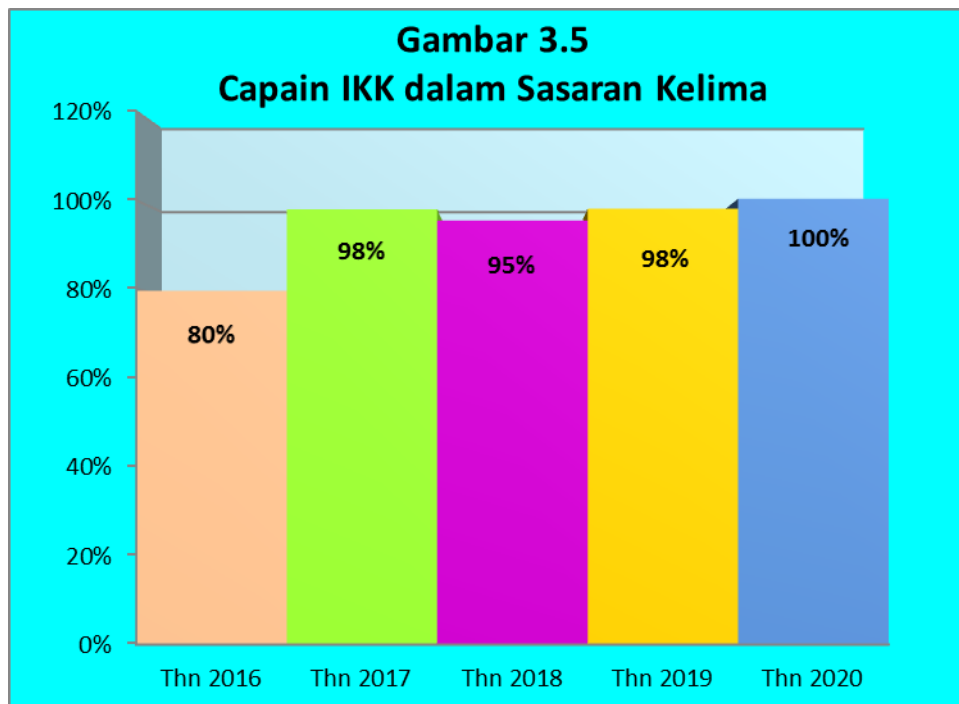
Dalam indikator ini, ada 5 regulasi hukum yang telah diselesaikan, yaitu :

1. PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara pemeriksaan kecelakaan kapal.
2. PM 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Panel Ahli Mahkamah Pelayaran yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Pakaian Dinas Sidang Tim Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli Mahkamah Pelayaran
4. Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Hak, Kewajiban dan Larangan serta Peraturan Disiplin Anggota Panel Ahli Non PNS
5. Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran tentang Kode Etik Anggota Panel Ahli dan Sekretaris Tim Panel Ahli Mahkamah Pelayaran

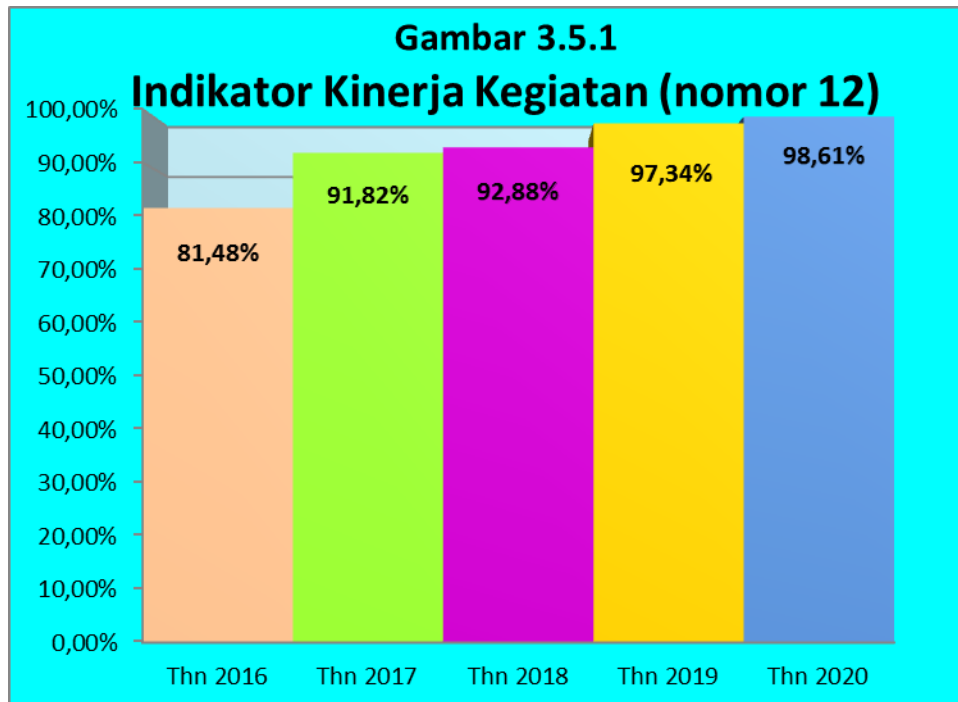
e. **Sasaran kelima adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran”**

Adapun kegiatan ini yang telah disetujui dalam DIPA Mahkamah Pelayaran Tahun Anggaran 2020, guna mencapai sasaran yang pertama adalah sebagai berikut :

- 12) Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran;
- 13) Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu
- 14) Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN
- 15) Persentase putusan yang diakses oleh publik

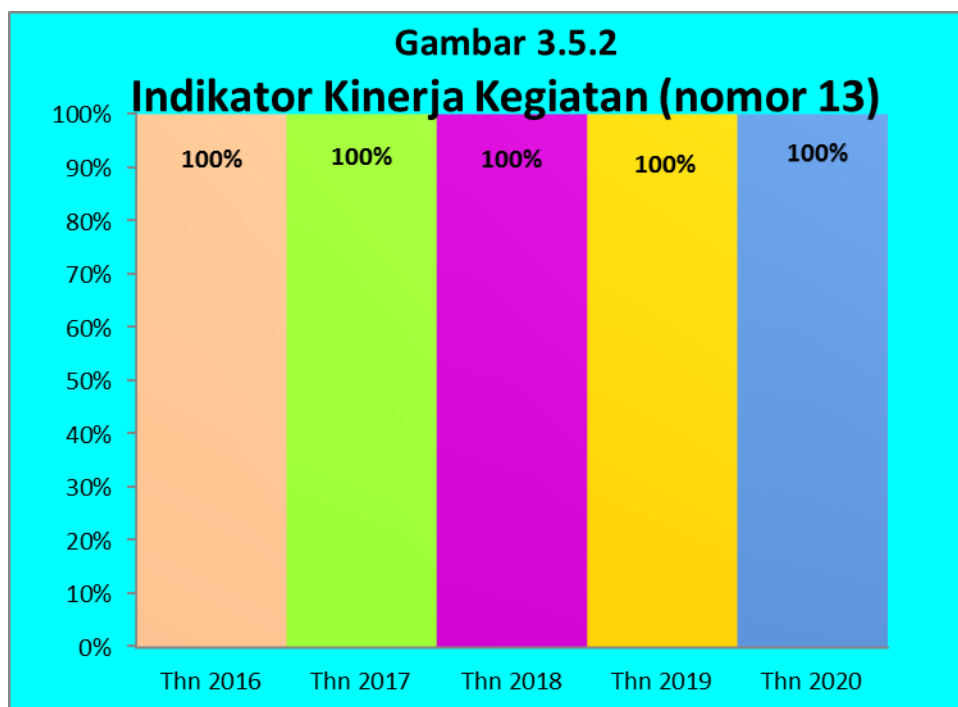


- (12) Pada Indikator Kinerja “Presentase penyerapan anggaran Mahkamah Pelayaran” Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 98,61% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 98,61%.



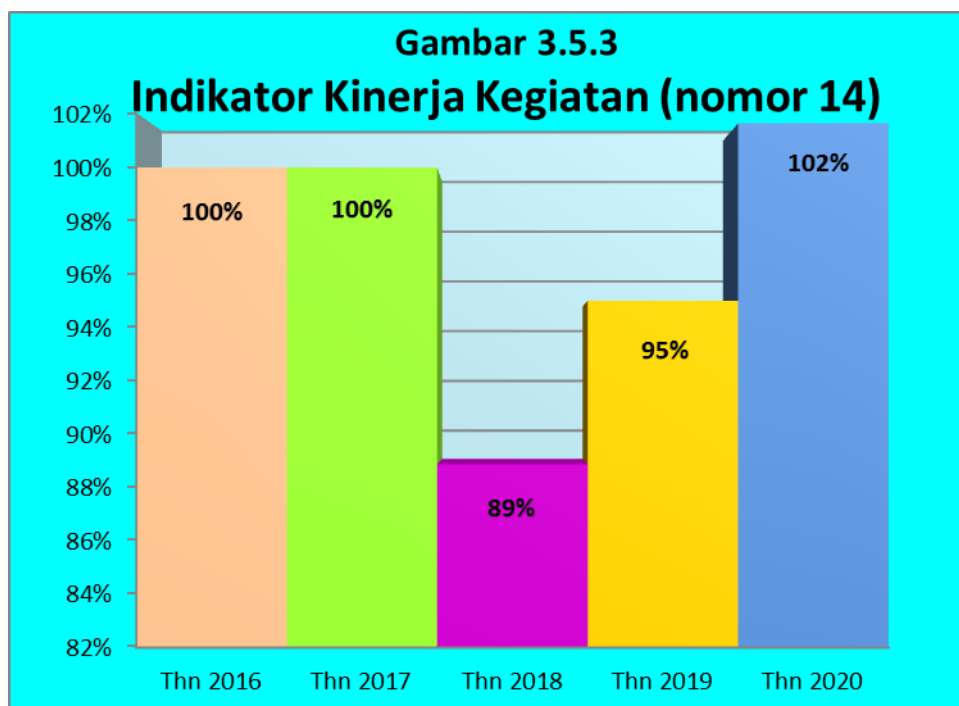
Tingkat penyerapan anggaran Mahkamah Pelayaran pada tahun 2020 sudah maksimal. Dari target pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 15.564.961.000, realisasinya sebesar Rp. 15.348.038.747. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 216.922.443, yang berasal dari sisa belanja pegawai sebesar Rp. 86.815.732 dan sisa belanja barang sebesar Rp. 130.106.711.

- (13) Pada Indikator Kinerja “Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.



Efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai target indikator jumlah kenaikan pangkat pegawai tepat waktu adalah melalui pengelolaan anggaran yang digunakan untuk kegiatan kepegawaian di Tahun 2020, dimana berhasil mencapai target kinerja 100 %.

(14) Pada Indikator Kinerja “Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN”. Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 101,66% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 101,66%.

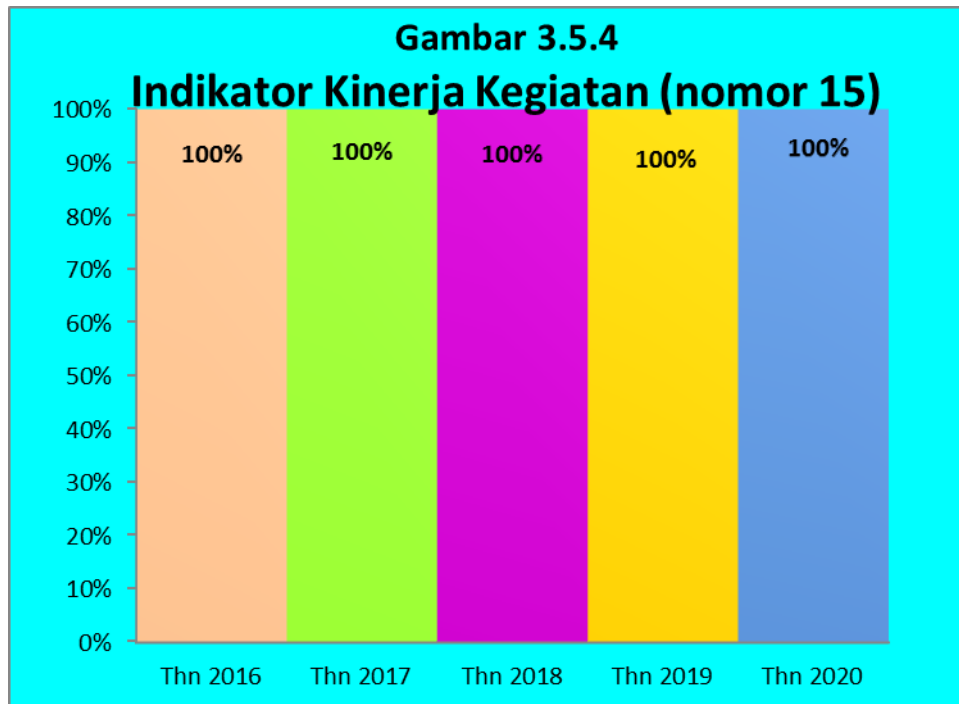


Nilai Asset Awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 87.293.730.907,-. dengan Realisasi Nilai Aset yang berhasil diinventarisir pada Akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 88.748.777.301 atau capaian sebesar 101, 67%.

Peningkatan Nilai Aset yang cukup signifikan tersebut berasal dari akumulasi nilai aset dari peralatan dan mesin sebesar Rp 1.455.046.394.- yang dilakukan rekonsiliasi data atas hasil penilaian kembali BMN pada Mahkamah Pelayaran yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2020 oleh KPKNL Jakarta.

(15) Pada Indikator Kinerja “Persentase putusan yang diakses oleh publik”.

Target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.



V. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Kementerian Perhubungan Tahun 2020, maka Anggaran APBN Kementerian Perhubungan yang dialokasikan untuk Mahkamah Pelayaran sebesar Rp. 15.564.961.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 2.707.830.000,-
- Belanja Barang : Rp. 11.554.365.000,-
- Belanja Modal : Rp. 1.302.766.000,-

Penyerapan anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 15.348.038.747 atau sebesar 98,61% dengan rincian perbelanjaan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 2.621.014.458,-
- Belanja Barang : Rp. 11.424.258.289,-
- Belanja Modal : Rp. 1.302.766.000,-

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2020 dapat diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{j=1}^2 RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4. Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2020 perbulan

NO.	BULAN	RPD	REALISASI ANGGARAN	TK (TINGKAT PENYERAPAN)
1	Januari	300.673.000	942.367.018	314,42%
2	Februari	301.473.000	1.087.712.472	360,80%
3	Maret	1.315.245.000	1.149.863.600	87,43%
4	April	1.311.507.000	876.344.362	66,82%
5	Mei	1.326.256.000	860.156.526	64,85%
6	Juni	1.328.318.000	495.330.605	37,29%
7	Juli	1.376.505.000	542.858.752	39,44%
8	Agustus	1.389.944.000	1.772.806.126	127,54%
9	September	1.399.994.000	782.884.664	55,92%
10	Oktober	1.397.007.000	1.622.474.524	116,14%
11	November	2.044.256.000	2.159.047.894	105,62%
12	Desember	2.073.783.000	3.056.192.204	147,37%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulankj} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus di atas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{(314,42\%+360,80\%+87,43\%+66,82\%+64,85\%+37,29\%+39,44\%+127,54\%+55,92\%+116,14\%+105,62\%+147,37\%)}{12}$$

$$K = 126,97 \%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2020 sebesar 126,97 %.

Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu di ketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAKkei / RVKkei}{PAKkei / TVKkei} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Tabel 3.5. Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	1) Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	50	100	200	179.851.000	171.735.466	95%
		2) Persentase penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100	94,12	94,12	2.480.427.000	2.464.536.000	99%
		3) Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal	%	100	100	100	104.132.000	81.851.750	78%
		4) Persentase Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku	%	100	100	100	115.440.000	115.438.100	99%
Rata-Rata Capaian Sasaran			141,17				98,39		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Meningkatnya efektifitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	5) Persentase Peserta Sosialisasi / diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi tentang keselamatan pelayaran	%	100	100	100	11.275.000	11.275.000	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran			100				100		
3.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	6) Jumlah Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal	Laporan	1	1	100	216.798.000	212.290.460	97%
		7) Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100	100	100	84.098.000	84.000.000	99%
Rata-Rata Capaian Sasaran			100				99,97		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi	Persentase SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalitas dalam pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal	%	100	40	40	13.200.000	13.200.000	100%
		9) Jumlah laporan penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1	1	100	182.129.000	181.230.900	99%
		10) Jumlah keikutsertakan Mahkamah Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional	Laporan	1	0	0	0	0	0
		11) Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan di Mahkamah Pelayaran	Laporan	5	5	100	84.000.000	84.000.000	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran			42,99				99,69		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	12) Persentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100	98,61	98,61	15.564.461.000	15.348.038.557	98,61%
		13) Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100	100	100	32.226.000	32.226.000	100%
		14) Persentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100	102,66	102,66	318.285.000	317.621.418	99,79%
		15) Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100	100	100	172.305.000	165.134.000	95%
Rata-Rata Capaian Sasaran			100,32				97,60		

B. Realisasi Anggaran

1) Pagu Anggaran

Pagu awal Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Mahkamah Pelayaran sebesar **Rp. 15.564.961.000,-** dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

-	Belanja Pegawai	:	Rp.	2.707.830.000,-
-	Belanja Barang	:	Rp.	11.554.365.000,-
-	Belanja Modal (RM/PNBP)	:	Rp.	1.302.766.000,-

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020 telah di Revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

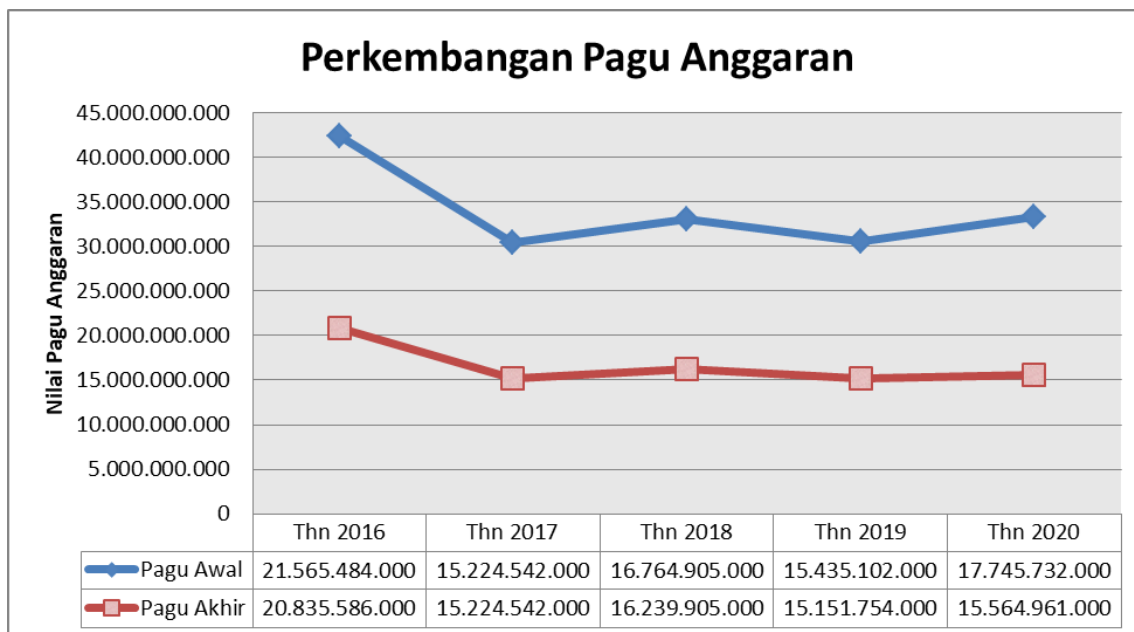
Tabel 3.6. Matriks Revisi Anggaran 2020

No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
1	DIPA AWAL	17.745.732.000		Tanggal 12 November 2019
2	Revisi I		15.564.961.000	Tanggal 30 April 2020
3	Revisi II		15.564.961.000	Tanggal 22 Oktober 2020
4	Revisi III		15.564.961.000	Tanggal 29 Desember 2020

Tabel 3.7. Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2016 - 2020

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pemotongan/ Pengurangan	Total	Self Blocking
1	2016	21.565.484.000	729.898.000	20.835.586.000	1.805.776.000
2	2017	15.224.542.000		15.224.542.000	
3	2018	16.764.905.000	525.000.000	16.239.905.000	
4	2019	15.435.102.000	283.348.000	15.151.754.000	
5	2020	17.745.732.000	2.180.771.000	15.564.961.000	

Gambar 3.6. Grafik Perkembangan Pagu Tahun 2016 - 2020



2) Realisasi Daya Serap Keuangan

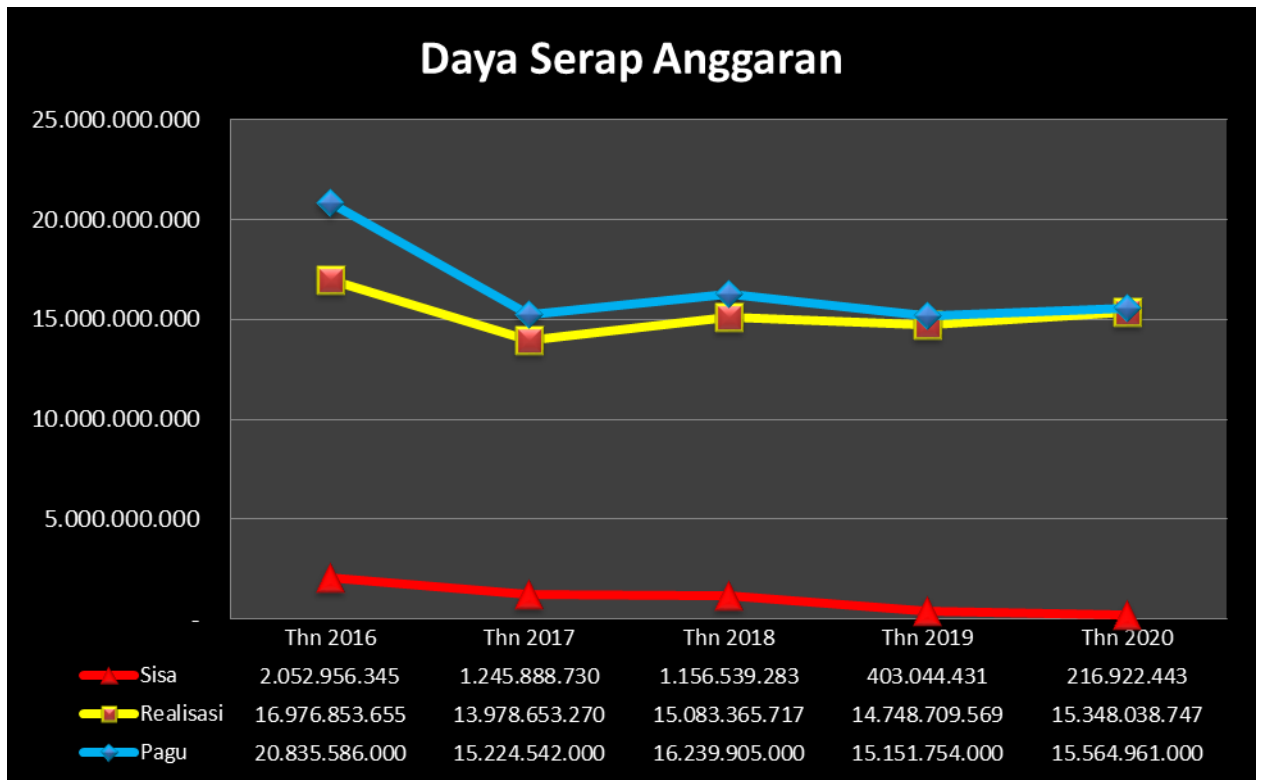
Realisasi daya serap dapat disajikan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2016 – 2020 seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8. Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		% Fisik	Sisa Yang Tidak Terealisasi	
		Rupiah	% Keu		Rupiah	% Keu
2016	20.835.586.000	16.976.853.655	81,48	100	2.052.956.345	18,52
2017	15.224.542.000	13.978.653.270	91,82	100	1.245.888.730	8,18
2018	16.239.905.000	15.083.365.717	92,88	100	1.156.539.283	7,12
2019	15.151.754.000	14.748.709.569	97,34	100	403.044.431	2,66
2020	15.564.961.000	15.348.038.747	98,61	100	216.922.443.	1,39

Catatan : Data s.d Bulan Desember 2020

Gambar 3.7. Daya Serap Anggaran Keuangan



3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

a) Belanja Pegawai

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2020 Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 sebesar Rp. 86.815.732,-, dengan detail sebagai berikut :

Tabel 3.9. Dana Belanja Pegawai Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
BELANJA PEGAWAI				
1965.994.001				
511111	1.758.125.000	1.746.981.040	11.143.960	99,37%
511119	126.000	26.747	99.253	21,23%
511121	130.056.000	125.711.380	4.344.620	96,66%
511122	33.916.000	32.899.350	1.016.650	97,00%
511123	81.200.000	68.750.000	12.450.000	84,67%
511124	96.865.000	86.197.000	10.668.000	88,99%
511125	14.938.000	9.313.711	5.624.289	62,35%
511126	82.182.000	80.531.040	1.650.960	97,99%
511129	232.585.000	193.721.000	38.864.000	83,29%
511151	59.613.000	59.585.000	28.000	99,95%
512211	218.224.000	217.298.000	926.000	99,58%
JUMLAH BELANJA PEGAWAI	2,707,830,000	2,621,014,268	86,815,732	96,79%

b) Belanja Barang

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2020 Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 sebesar Rp 130,106,711,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.10. Dana Belanja Barang Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
BELANJA BARANG				
521111	1.778.856.000	1.760.283.440	18.572.560	98,96%
521114	24.487.000	16.356.887	8.130.113	66,80%
521115	237.240.000	237.240.000		100%
521119	195.189.000	195.138.153	50.847	99,97%
521131	57.380.000	56.219.415	1.160.585	97,98%
521211	365.124.000	342.137.383	22.986.617	93,70%
521213	13.200.000	13.200.000		100%
521219	75.049.000	75.016.750	32.250	99,96%
521241	27.945.000	27.945.000		100%
521811	559.844.000	559.387.700	456.300	99,92%
521841	262.921.000	262.867.750	53.250	99,98%
522141	50.600.000	50.600.000		100%
522151	34.100.000	24.600.000	9.500.000	72,14%
522191	12.000.000	12.000.000		100%
522192	286.400.000	277.399.000	9.001.000	96,86%
523111	472.080.000	469.830.750	2.249.250	99,52%
523121	1.190.476.000	1.184.421.718	6.054.282	99,49%
524111	5.425.256.000	5.374.224.343	51.031.657	99,06%
524114	258.400.000	258.400.000		100%
524115	78.000.000	78.000.000		100%
524119	149.818.000	148.990.000	828.000	99,45%
JUMLAH BELANJA BARANG	11,554,365,000	11,424,258,289	130,106,711	98,87%

c) Belanja Modal

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2020 Mahkamah
Pelayaran Tahun 2020 sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11. Dana Belanja Modal Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Kode/ Mak	Pagu dalam DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)	Persen
1	2	3	4	5
BELANJA MODAL				
532119	1,302,766,000	1,302,766,000	0	100%
JUMLAH BELANJA MODAL	1,302,766,000	1,302,766,000	0	100%
TOTAL BELANJA	15.564.961.000	15.348.038.557	0	98,61%



A. KESIMPULAN

1. Penyusunan laporan kinerja Mahkamah Pelayaran dilakukan dan disusun sebagai wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Nilai capaian kinerja sasaran program Mahkamah Pelayaran secara keseluruhan selama periode tahun anggaran 2020 mencapai 126,97 sedangkan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran program tersebut adalah sebesar 98,61 dari alokasi anggaran. Capaian kinerja secara garis besar sebagai berikut :

a. Sasaran pertama adalah “Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan pelayaran”

- 1) Pada Indikator Kinerja “Tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran”, target kinerja tahun 2020 sebesar 50%, dengan realisasi kinerja 100% dengan capaian kinerja adalah sebesar 200%;
- 2) Pada Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi adalah sebesar 94,12% dan capaian kinerja 94,12%;
- 3) Pada Indikator Kinerja “Persentase ketepatan waktu Pemeriksaan Lanjut Kecelakaan kapal”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;

- 4) Pada Indikator Kinerja “Persentase Jumlah BAPP yang telah disusun dengan standar peraturan yang berlaku”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
- b. Sasaran kedua adalah “Meningkatnya efektifitas sosialisasi / bimbingan teknis / Seminar tentang Pembuatan BAPP untuk Perkara Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal”**
 - 5) Pada Indikator Kinerja “Persentase Peserta Sosialisasi / diseminasi / Seminar / Workshop / Publikasi tentang keselamatan pelayaran”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.
- c. Sasaran ketiga adalah “Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal serta data proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal”**
 - 6) Pada Indikator Kinerja “jumlah laporan data statistik kecelakaan kapal”, target kinerja tahun 2020 sebesar 1 dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
 - 7) Pada Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Putusan Kecelakaan Kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.
- d. Sasaran keempat adalah “Meningkatnya Kualitas SDM Mahkamah Pelayaran dan Reformasi Regulasi”**
 - 8) Pada Indikator Kinerja “Persentase SDM Anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang lanjutan kecelakaan kapal”, target kinerja tahun 2020 sebesar 1 dengan realisasi 1 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
 - 9) Pada Indikator Kinerja “Jumlah laporan penataan system manajemen SDM Mahkamah Pelayaran”, target kinerja tahun 2020 sebesar 1 dengan realisasi 0 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 0;
 - 10) Pada Indikator Kinerja “Jumlah keikutsertakan Mahkamah Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%;
 - 11) Pada Indikator Kinerja “Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran”, target kinerja tahun 2020 sebesar 5 dengan realisasi 5 dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

e. **Sasaran kelima adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran”**

- 12) Pada Indikator Kinerja “Presentase Realisasi Anggaran Mahkamah Pelayaran”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 98,61% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 98,61%;
- 13) Pada Indikator Kinerja “Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.
- 14) Pada Indikator Kinerja “Presentase Barang Milik negara yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 101,66% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 101,66%.
- 15) Pada Indikator Kinerja “Persentase putusan yang diakses oleh publik”, target kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian realisasi kinerja adalah sebesar 100%.

Gambar 4.1 Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2020



Dengan demikian sesuai kriteria keberhasilan dapat dikatakan Unit Kerja Mahkamah Pelayaran telah berhasil dalam mencapai kinerjanya. Karena hampir seluruh sasaran dapat dilaksanakan melebihi dari target awal yang telah ditentukan.

B. SARAN /REKOMENDASI

Beberapa hal yang direkomendasikan dalam perbaikan guna peningkatan kinerja tahun 2020 sebagai berikut :

1. Personil yang dimiliki oleh Mahkamah Pelayaran masih kurang, sehingga perlu adanya penambahan personil untuk menunjang kegiatan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Pelayaran dibidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal
3. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Melalui Diklat/Pelatihan-pelatihan, sehingga kinerja para aparatur negara dalam bekerja semakin meningkat.
5. Sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Mahkamah Pelayaran belum sepenuhnya memadai.
6. Struktur organisasi yang ada sekarang ini belum secara optimal mendukung pelaksanaan fungsi Mahkamah Pelayaran dimana belum adanya mekanisme kerja pimpinan yang diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

LAMPIRAN

I. Kegiatan Subbagian Perkara dan Persidangan



Prasidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal MT. Palu Sipat/P.1025 Membentur Jetty Nomor 03, pada tanggal 23 Januari 2020 Pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Lt.2 Mahkamah Pelayaran



Prasidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Kandasnya MT.Ahmad Jabbar dan Tenggelamnya KMP.Dharma Rucitra tanggal 27 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB di Ruang Serbaguna Lt.3 Mahkamah Pelayaran



Cek Lokasi Kejadian Terbakarnya KLM. Cahaya Mandiri oleh Tim Panel Ahli, Sektaris Tim Panel Ahli tanggal 6 Pebruari 2020 di Kali Baru Timur – Semarang



Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal MT. Palu Sipat/P.1025 Membentur Jetty Nomor 03 tanggal 20 Pebruari 2020 di Sei Gerong Plaju Perairan Sungai Musi Palembang



Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Kandasnya KM. Graha Angkasa I tanggal 03 Februari 2020 lebih kurang pukul 06.00 WITA di Pantai Likupang-Sulawesi Utara tanggal 12 s.d 13 Agustus 2020



Pengambilan Sumpah Saksi Pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tubrukan Antara TK.Indo Sukses-25 yang ditunda Capricorn-126 dengan Fender Pilar Jembatan Sungai Mahakam tanggal 10 s.d 11 November 2020.



Pengambilan Sumpah Saksi KTP PT.Pelni (Persero) dan Head Of DPA PT.Pelni (Persero) Ampenan Mataram pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal KM.Gandha Nusantara tanggal 15 s.d 16 September 2020 di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang, Lombok Utara.



Sidang Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal Tubrukan Antara TK.Indo Sukses-25 yang ditunda Capricorn-126 dengan Fender Pilar Jembatan Sungai Mahakam pada tanggal 30 November 2020 bertempat di Kantor Mahkamah Pelayaran.



Kegiatan Pembahasan Draf Keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Kecelakaan Kapal Kandasnya KM. Gandha Nusantara 09 pada tanggal 29 Mei 2020, pukul 05.00 WITA di Pantai Sire Kecamatan Pemenang - Lombok Utara, telah dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 13 November 2020 di Grand Mulya Bogor Resort & Convention Hotel Jl. Babakan Tumas No.16 Desa Cikeas - Sukaraja Sentul Bogor.



Pembahasan Draf Keputusan Mahkamah Pelayaran Tentang Kandasnya TB.Bina 95 yang ditunda KT.Buana Nusantara 7 di perairan Tanjungan Menjangan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 s.d 20 November 2020 di Hotel Horison Tirta Sanita Kuningan - Jawa Barat



Pada tanggal 11 s.d. 13 Maret 2020 di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tanjungpandan Bangka Belitung melakukan pencarian data awal berkas Tenggelamnya KM. EL No. 2 dan tenggelamnya KT. Trust Line 919 yang digandeng KT. Trust 88 yang terjadi di wilayah Perairan Pulau Belitung.



Pada Tanggal 01 s.d. 04 Desember 2020 melakukan pencarian data awal berkas Tubrukan KM.Ever Top dengan KM.Senja Persada di Perairan Kabaena Tanjung Pising Sulawesi Tenggara.

II. Kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum



Focus Group Discussion (FGD) Mahkamah Pelayaran tentang Keputusan, Status Panel Ahli dan Organisasi Tata Kerja, pada tanggal 26 S.D. 28 Oktober 2020, di Hotel Orchardz Industri Jakarta.



Focus Group Discussion (FGD) Mahkamah Pelayaran tentang Pemahaman Tugas dan Fungsi Mahkamah Pelayaran dan Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, pada tanggal 23 S.D. 25 Nopember 2020, di Hotel Orchardz Industri Jakarta

III. Kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan



Kegiatan Bimbingan teknis keuangan di Lingkungan Mahkamah Pelayaran yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 07 – 08 Agustus 2020 di Hotel IBIS Styles, Bekasi

IV. Kegiatan Subbagian Perencanaan dan Laporan



Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 di Hotel Grand Orchard, Jakarta tanggal 21 s.d 23 Desember 2020.

Matrik Rencana Strategis periode tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target dan Capaian Kerja														
			2015			2016			2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
a.	Jumlah data kapal yang ditindaklanjuti	Persentase	50	34	75%	30	33	110%	30	28	90%	30	34	113%	33	19	57,6%
b.	Jumlah perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	Persentase	50	49	98%	30	33	110%	30	28	90%	30	33	110%	33	19	57,6%
c.	Persentase ketepatan waktu pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	Persentase	100	88	88%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
d.	Persentase jumlah BAPP yang telah disusun sesuai dengan standar peraturan yang berlaku	Persentase	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
e.	Jumlah peserta sosialisasi / bimbingan teknis / seminar tentang pembuatan BAPP / sosialisasi PP untuk perkara pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	Persentase	50	58	116%	55	120	218%	55	120	218%	55	50	91%	60	205	341%

f.	Jumlah laporan data statistik kecelakaan kapal berdasarkan putusan Mahkamah Pelayaran	Laporan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
g.	Persentase jumlah putusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	Persentase	19	19	100%	30	33	110%	30	28	93,33%	34	34	100%	18	18	100%
h.	Jumlah SDM anggota Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas keahlian profesionalisme dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	Persentase	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	15	15	100%	17	17	100%
i.	Jumlah penataan sistem manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
j.	Jumlah keikutsertaan Mahkamah Pelayaran dalam sidang IMO	Laporan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
k.	Jumlah RPM tentang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	Laporan	1	1	100%				1	1	100%				1	1	100%

l.	Persentase realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran	Persentase	100	54,41	54,41%	100	81,48	81,48%	100	91829	91,82%	100	92,88	92,88%	100	97,34	97,34%
m.	Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Persentase	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
n.	Persentase BMN yang tercatat dan terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Persentase	100	33,33	33,33%	100	100	100%	100	100	100%	100	88,87	88,87%	100	100	100%
o.	Persentase putusan yang diakses oleh publik	Persentase	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2020**

Mahkamah Pelayaran Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Jalan Bulevar Gading Timur Kelapa Gading Jakarta Utara 14250

No. Telp. (021) 4533331, 4509166, Fax : 4509165

Website : mahpel.dephub.go.id

Email : mahkamah_pelayaran@yahoo.co.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN
MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2020

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	a.	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	100
		b.	Persentase perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
		c.	Persentase ketepatan Waktu Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	%	100
		d.	Persentase sejumlah BAPP yang telah disusun sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.	%	100
2.	Meningkatnya efektifitas sosialisasi/ bimbingan teknis/ seminar/ workshop/ publikasi tentang keselamatan pelayaran	a.	Persentase peserta sosialisasi/ bimbingan teknis/ seminar/ workshop/ publikasi tentang keselamatan pelayaran	%	100
3.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	a.	Jumlah laporan statistik kecelakaan kapal	Laporan	1
		b.	Persentase sejumlah putusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100

4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Mahkamah Pelayaran dan reformasi regulasi	a.	Persentase SDM Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan.	%	100
		b.	Jumlah Laporan Penataan system manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1
		c.	Jumlah keikutsertaan Mahkamah Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional (IMO)	Laporan	1
		d.	Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran	Laporan	5
5.	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	a.	Presentase Realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100
		b.	Presentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100
		c.	Persentase Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100
		d.	Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100


 Jakarta, November 2020
KETUA MAHKAMAH PELAYARAN
ADIKARSYAF, S.H., M.H
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19610103 199103 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KETUA MAHKAMAH PELAYARAN
TAHUN 2020**



**MAHKAMAH PELAYARAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Perubahan Perjanjian Kinerja Mahkamah Pelayaran Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perubahan Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di Mahkamah Pelayaran berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dengan Perubahan Perjanjian Kinerja ini diharapkan agar para pemimpin mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat. Dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dalam menjalankan tugas.

Jakarta, November 2020

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN



ADI KARSYAF, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610103 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MAHKAMAH PELAYARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ADI KARSYAF, S.H.,M.H
Jabatan : Ketua Mahkamah Pelayaran

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, November 2020
KETUA MAHKAMAH PELAYARAN

ADI KARSYAF, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610103 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MAHKAMAH PELAYARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI KARSYAF, S.H.,M.H
Jabatan : Ketua Mahkamah Pelayaran

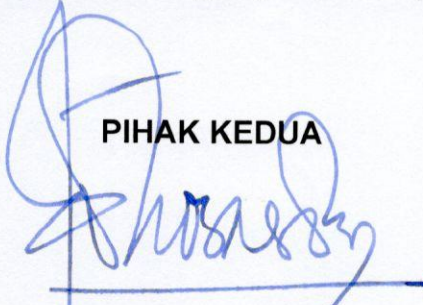
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA

DR.Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630925 199003 1 003

Jakarta, November 2020


PIHAK PERTAMA

ADI KARSYAF, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610103 199103 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
MAHKAMAH PELAYARAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen keselamatan transportasi	a.	Tingkat Pemanfaatan rekomendasi hasil putusan sidang Mahkamah Pelayaran	%	100
		b.	Persentase perkara kecelakaan kapal yang diputus tepat waktu	%	100
		c.	Persentase ketepatan Waktu Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal	%	100
		d.	Persentase sejumlah BAPP yang telah disusun sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.	%	100
2.	Meningkatnya efektifitas sosialisasi/ bimbingan teknis/ seminar/ workshop/ publikasi tentang keselamatan pelayaran	a.	Persentase peserta sosialisasi/ bimbingan teknis/ seminar/ workshop/ publikasi tentang keselamatan pelayaran	%	100
3.	Tersedianya data dan informasi kecelakaan kapal dan proses pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal	a.	Jumlah laporan statistik kecelakaan kapal	Laporan	1
		b.	Persentase sejumlah putusan kecelakaan kapal yang disajikan melalui website Mahkamah Pelayaran	%	100

4.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Mahkamah Pelayaran dan reformasi regulasi	a.	Persentase SDM Kesekretariatan Mahkamah Pelayaran yang ditingkatkan kapasitas manajemen kepemimpinan dan pemerintahan.	%	100
		b.	Jumlah Laporan Penataan system manajemen SDM Mahkamah Pelayaran	Laporan	1
		c.	Jumlah keikutsertaan Mahkamah Pelayaran dalam Sidang Organisasi Maritime Internasional (IMO)	Laporan	1
		d.	Jumlah Regulasi Hukum Rancangan Peraturan Mahkamah Pelayaran	Laporan	5
5.	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran kesekretariatan Mahkamah Pelayaran	a.	Persentase Realisasi anggaran Mahkamah Pelayaran	%	100
		b.	Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100
		c.	Persentase Barang Milik Negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	%	100
		d.	Persentase putusan yang diakses oleh publik	%	100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Belanja Pegawai	Rp. 2.707.830.000
2.	Belanja Barang	Rp. 11.554.365.000
3.	Belanja Modal	Rp. 1.302.766.000
Jumlah Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan Tahun 2020 :		Rp. 15.564.961.000 ;

SEKRETARIS JENDERAL

DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19630925 199003 1 003

Jakarta, November 2020

KETUA MAHKAMAH PELAYARAN



ADI KARSYAF, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610103 199103 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MAHKAMAH PELAYARAN**

Alamat : Jl. Bulevar Gading Timur, Kelapa Gading 14250
Telepon : (021) 4533331